



PERUBAHAN RENSTRA DINSOSP3AKB 2019 - 2024

DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU

Email : dinsosp3akb@mail.sanggau.go.id

Website : www.Dinsosp3akb.sanggau.go.id

Kode Pos : 78512

Telp : (0564) 21035

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Pada prinsipnya Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini merupakan Dokumen Acuan Operasional pelaksanaan kegiatan Tahun 2019-2024 yang dalam penyusunannya berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh Unit-unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan kami Renstra ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya Semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ini dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau **“Pelayanan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang Sejahtera”**.

Sanggau, Januari 2022
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau



Drs. ALOYSIUS YANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199412 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	9
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	11
2.1.2 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai).....	20
2.2.2 Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja (Aset)	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	45
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra dan Renstra Provinsi	57
3.3.1 Telaahan Renstra dan Renstra Provinsi	57
3.3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).....	62
3.3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kementerian	

	PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).....	65
3.3.4	Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	68
3.3.5	Sasasran jangka menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi terhadap permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencan	69
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	70
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis	71
3.5.1	Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	73
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	75
4.1	Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	75
4.2	Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	75
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB...	80
5.1	Strategi	80
5.2	Arah Kebijakan.....	81
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.....	85
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	103
BAB VIII	PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan Golongan Tahun 2020	21
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	22
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kontrak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	22
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2020.....	23
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 2.7	Analisis Strategi dengan Faktor SWOT.....	42
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	45
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat dalam pencapaian visi dan misi Daerah dan wakil kepala daerah.....	54
Tabel 3.3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung.....	61
Tabel 3.3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung	63
Tabel 3.3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian	

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung	66
Tabel 3.3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Beserta Penghambat dan Pendukung	68
Tabel 3.3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Beserta Penghambat dan Pendukung	69
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	77
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	82
table 6.1	Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	88
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2020-2024	104
Tabel 7.2	Rumusan Indikator	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Alur Pikir dalam Penyusunan Renstra	I-2
Gambar	1.1	Alur Pikir Integrasi Renstra DINSOSP3AKB Kab. Sanggau	I-3
Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	II-14
Gambar	2.3	Indeks Pembangunan Gender Nasional dengan Provinsi Kalimantan Barat	II-35
Gambar	2.3	Indeks Pembangunan Gender Nasional dengan Provinsi / Kabupaten / Kota	II-36
Gambar	2.3	Indeks Pembangunan Gender Provinsi dan Kabupaten / Kota	II-36
Gambar	2.3	Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Provinsi	II-37
Gambar	2.3	Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dengan Provinsi / Kabupaten / Kota	II-38
Gambar	2.3	Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi dengan Kabupaten / Kota	II-38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Nasional/Daerah serta telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 menjadi Peraturan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menindaklanjuti dengan membuat Rencana Strategi (Renstra), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk tahun 2019-2024, dan kemudian sebagai turunannya dibuat Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau setiap tahun sebagai salah satu pedoman kerja bagi OPD.

Memperhatikan Visi Kabupaten Sanggau yaitu : “**SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN**” serta melihat kondisi dan situasi pada masa sekarang ini yang mengalami era globalisasi dan Otonomi Daerah serta mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sebagai salah satu organisasi pemerintah dan perangkat daerah perlu terus menerus mengembangkan, meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat serta diharapkan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal pembiayaan dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

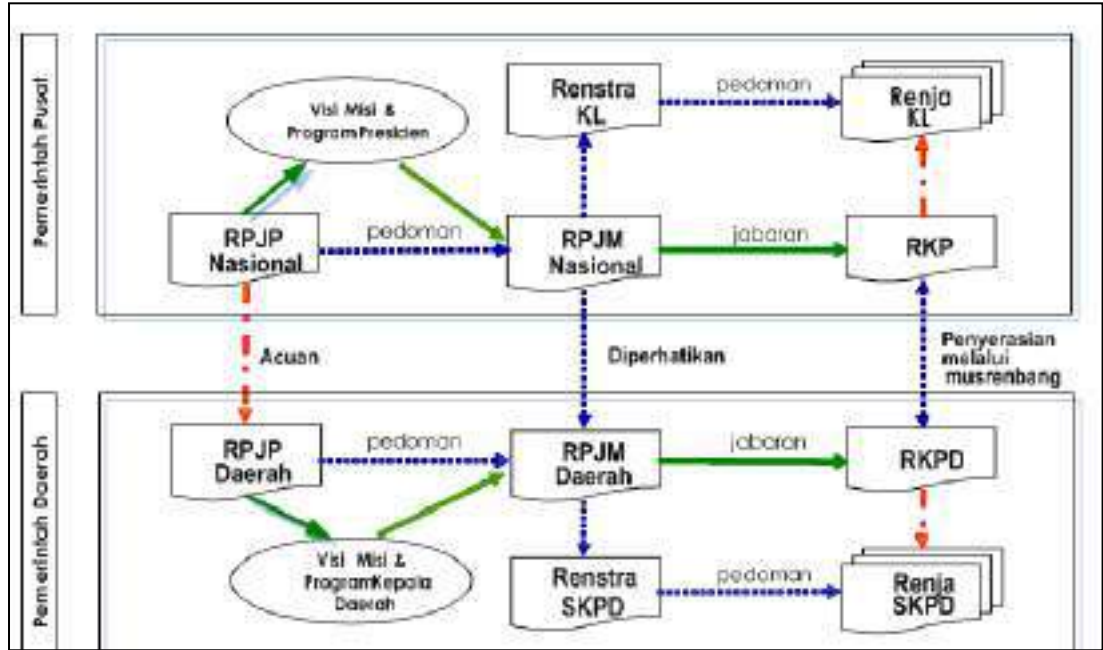
Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung

oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai Pedoman Presiden untuk menyusun Rencana Pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional. Dengan berlakunya Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga diperkuat dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, diharapkan mampu mensinergikan harapan-harapan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dapat terwujudnya kinerja pemerintah dan kelembagaan daerah yang

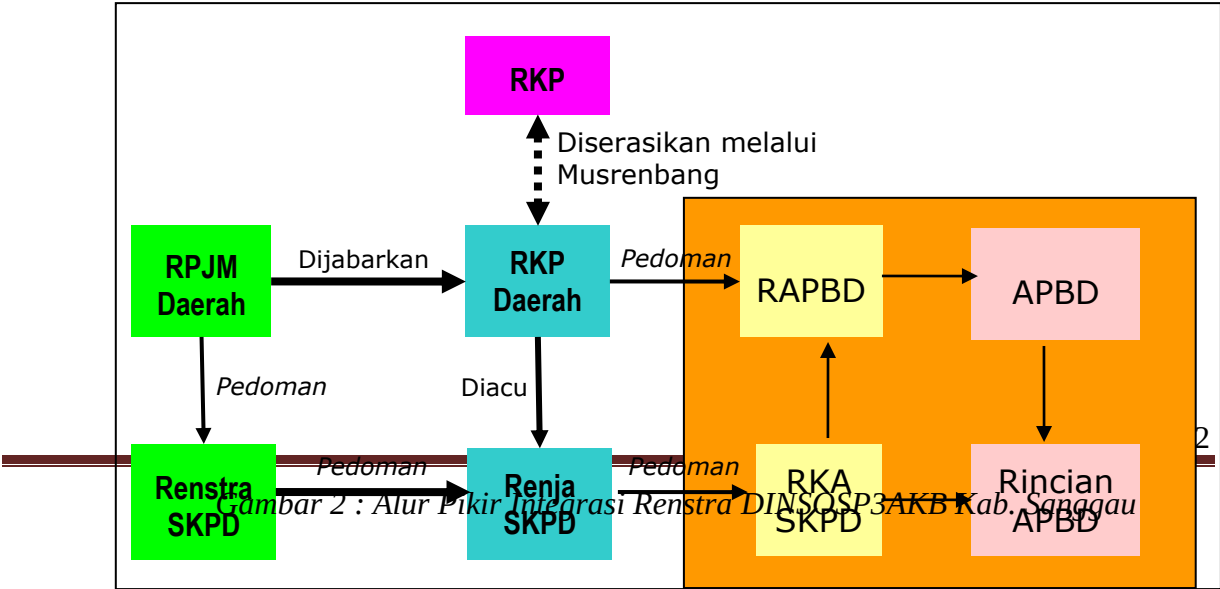
semakin baik serta tercapainya sasaran dan target pembangunan yang diinginkan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 : Alur Pikir dalam Penyusunan Renstra

Alur Pikir integrasi Renstra Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut :



Gambar 2 : Alur Pikir Integrasi Renstra DINSOSP3AKB Kab. Sanggau

RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RTRW Kabupaten Sanggau merupakan dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi : 1). kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

RPJMD Kabupaten Sanggau akan dijabarkan di dalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menjadi acuan untuk penyusunan RKA-DINSOSP3AKB (Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Adapun *critical point*

dari susunan ini adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DINSOSP3AKB, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja DINSOSP3AKB.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra DINSOSP3AKB Kab. Sanggau mengacu pada peraturan per Undang-undangan yang berlaku yaitu :
1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional UUD '45, serta 3) Landasan operasional :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); lembar
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2019 – 2024 adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJS Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 yang menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ini adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

Dinas Sosial P3AKB 2019-2024 dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024;

2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat sebagai DinsosP3AKB.
3. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1.4 Sistematika Penulisan.

Dalam Penulisan Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial P3AKB

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
 - 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
 - 2.1.2 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sanggau

- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan isu-isu Strategis DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial Dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat/ BKKBN.
 - 3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial Dengan Rencana Strategis DINSOSP3AKB
 - 3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial / BKKBN,
 - 3.3.3. Telaahan Rencana Strategis Renstra PPPA
 - 3.3.4. Telaahan Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Barat dengan Rencana strategis DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1 Strategi Jangka Menengah DINSOSP3AKB
- 5.2 Arah Kebijakan DINSOSP3AKB

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

**GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SANGGAU**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

C. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial Masyarakat
2. Seksi Penyuluhan Bimbingan dan Kepahlawanan, Keperintisan Kesetiakawanan Sosial
3. Seksi Penanganan Fakir Miskin

D. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu:

1. Seksi Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar
2. Seksi Rehabilitasi Sosial
3. Seksi Bantuan Sosial

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Serta Masyarakat
2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan

F. Bidang Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

G. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

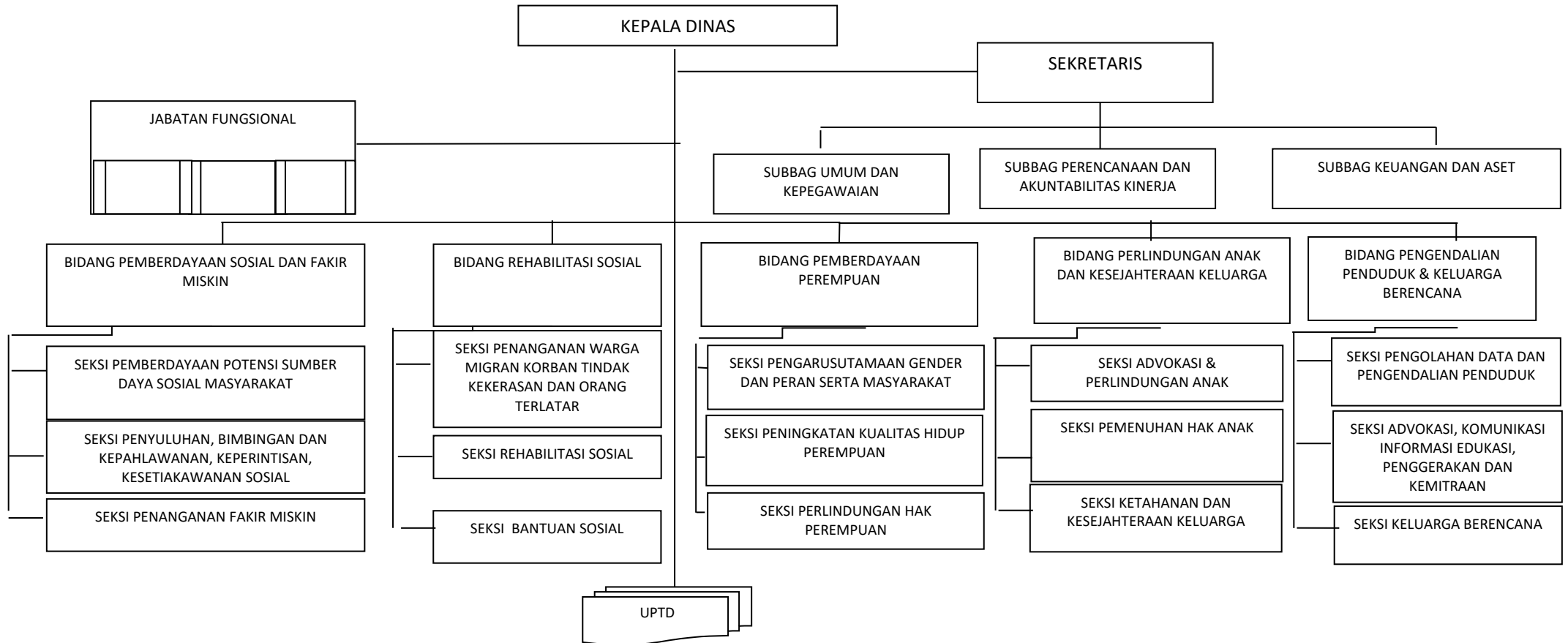
1. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Penduduk
2. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Kemitraan
3. Seksi Keluarga Berencana

H. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

I. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**



2.1.2 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi :

1. Kepala Dinas

Sesuai pasal 19 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas bantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan atas atas penyelenggaraan urusan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
4. Pelaksanaan administrasi dilingkup Dinas,
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- c. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- d. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
- e. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
- f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

- g. Pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas,
- h. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan Dinas,
- i. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas,
- j. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas,
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas,
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- m. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- n. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- o. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan

dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,

- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- q. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- r. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan

Dalam melaksanakan tugas Bidang pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta

masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Upt Dinas

UPT Dinas bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

9. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai dan Tenaga Kontrak)

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau No 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah : 1 (satu) orang eselon IIb yaitu Kepala Dinas; 1 (satu) orang eselon IIIa yaitu sekretaris, 5 (Lima) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang, serta 18 (Delapan Belas eselon IVa)

Adapun total jumlah Sumber Daya Manusia atau Tenaga Pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara keseluruhan adalah 60 Orang yang meliputi pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil/Fungsional Umum sebanyak 38 orang, serta berstatus Non PNS atau Tenaga Kontrak berjumlah 22 Orang. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan, oleh sebab itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui data tersebut maka diketahui bahwa tenaga Pegawai Negeri Sipil berstatus fungsional umum hanya berjumlah 38 yang terdiri dari 14

orang laki-laki atau 36,84 % dan perempuan sebanyak 24 orang atau 63,15%. Jika dihitung berdasarkan tingkat golongan maka jumlahnya terdiri dari golongan IV sebanyak 5 orang atau 13,15 %, golongan III sebanyak 27 orang atau 71,05 % dan sisanya golongan II sebanyak 5 orang atau 13,15 % dan golongan I sebanyak 1 orang atau 2,63 %. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	Jenis Kelamin	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	Jumlah
1	Laki-laki	1 Orang	2 orang	7 orang	4 orang	14 orang
2	Perempuan	-	3 orang	20 orang	1 orang	24 orang
	Total	1 Orang	5 orang	27 orang	5 orang	38 orang

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Oktober 2021)

Adapun komposisi jumlah pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan maka dapat dikatakan bahwa rata-rata pegawai dengan pendidikan akhir sarjana lebih banyak dibandingkan dengan yang pendidikan di bawah Strata 1, dengan latar belakang pendidikan tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Jika dihitung, adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana sebanyak 8 orang atau 21,05 %, Sarjana (Strata 1) sebanyak 15 orang atau 39,47 %, Diploma IV 3 Orang atau 7,89 %, Diploma III sebanyak 3 Orang atau 7,89 %, berpendidikan SLTA sebanyak 7 orang atau 18,42 %, pendidikan SMP

sebanyak 1 orang atau 2,63% serta pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 2,63%. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	D1/II	DIII/Akademi	DIV	S1	S2	Jumlah
1	Laki-laki	1	1	3	-	-	2	3	5	14
2	Perempuan	-	-	4	-	3	1	12	3	24
	TOTAL	1	1	8	-	3	3	15	8	38

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Oktober 2021)

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kontrak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin		Pendidikan		
			SMA	D3	S.1
1	Laki – Laki	11	12	-	3
2	Perempuan	11	-	2	5
	Total	22	12	2	8

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Oktober 2021)

2.2.2 Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja (Asset)

Adapun sarana dan perasarana pendukung kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau
Tahun 2021**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor		Bangunan Rusak Ringan	1
2	Kamera		Rusak Ringan	1
3	Brangkas	Baik		2
4	Meja 1 Biro		Rusak	2
5	Meja 1/2 Biro	3 Baik	1 Rusak Ringan	4
			3 Rusak Ringan	3
6	Mesin Ketik Manual		1 Rusak Ringan	1
7	Lemari kayu	8 Baik		8
8	Podium		Rusak Ringan	1
9	Bilboard		Rusak Ringan	1
10	Printer		4 Rusak Ringan	12
		10 Baik		
11	Faximile	Baik		1
12	Telepon		Rusak Ringan	1
13	Sepeda Motor	59 Baik		60
			1 Rusak Berat	
14	Kursi	Baik		3
15	Kursi tamu	Baik		1
16	Kursi Putar	Baik		1
17	Televisi	2 Baik		4
			2 Rusak Berat	
18	Kain Horden	Baik		1
19	Karpet	Baik		1
20	PC. UNIT	6 Baik		16
			10 Rusak Ringan	
21	UPS		3 Rusak Ringan	3
22	Parabola		Rusak Ringan	1
23	Mobil Oprasional (Mini Bus)	5 Baik		8
			2 Rusak Ringan	
	Truck	1 Baik		
24	Mesin potong rumput	Baik		1

25	Kursi plastik	Baik		1
26	Ac Split	Baik		15
27	Laptop	Baik		10
28	Rak Piring	Baik		1
29	Tempat tidur	Baik		1
30	Kompor Gas	Baik		1
31	Wireles	Baik		1
33	Kipas Angin Walpan	Baik		1
	Kipas Angin Berdiri	Baik		1
34	LCD Proyektor	2 Baik		2
35	Tong Air	Baik		1
36	Mobil Operasional Antar Jemput Akseptor KB	2 Baik		3
			1 Rusak Berat	
37	Mesin Absensi	Baik		
38	Kursi besi/metal	Baik		3
39	Balai Penyuluh KB Kecamatan	Baik		15

(Sumber : Data Subbag Keuangan dan Aset DINSOSP3AKB Kab Sanggau Oktober 2021)

2.3 Kinerja Pelayanan DINSOSP3AKB

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DINSOSP3AKB dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan gambaran kinerja secara garis besar, hasil pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2020-2024 rata-rata mencapai realisasi 0,48 %.

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) melebihi capaian target kinerja.

Adapun program yang mencapai realisasi 80% adalah program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

serta Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) dan kegiatan Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembanguna

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat

Dilihat pada table 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Tahun 2014-2018

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%			8	10	12	14	16	6	8	10	12	14	0,75	0,8	0,83	0,85	0,87
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%			10	10	10	10	10	7	7	7	7	7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94

4	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
5	Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
6	Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
7	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94

8	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan			25	30	35	40	45	30	35	40	45	50	1,2	1,16	1,14	1,12	1,11
9	Rasio perempuan korban perdagangan orang	Per 1000 Perempuan			25	30	35	40	45	30	35	40	45	50	1,2	1,16	1,14	1,12	1,11
10	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
11	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
12	Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94

	pelayanan																		
13	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
14	Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
15	Perentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
16	Persentase lembaga layanan	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94

	perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif																		
17	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
18	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
19	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/ Tingkat			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
20	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94

21	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
22	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
23	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
24	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94

25	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
26	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
27	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
28	Persentase anak korban kekerasan	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
29	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94

30	Persentase pekerja anak	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
31	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
32	Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran ;	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
33	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
34	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu	%			70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94

Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sedangkan Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan periode Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 :

Tabel 2.5																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana																			
Kabupaten Sanggau																			
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DINSOSP3AKB	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DINSOSP3AKB					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rata-rata nilai capaian SKP				80					80					1				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				91,84	92	92,50	93	93,50	91,87	91,27				1,03	0,99			
3	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan prima				100	100	100	100	100	100	100				100	100			
4	Persentase PMKS yang tertangani	%			96,9	97	97,45	97,75	98,2	69,06	97,34				0,71	1			
5	Persentase PMKS Yang difasilitasi	%			100	100	100	100	100	100	100				1	1			
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%			61,35	61,42	61,54	61,65	61,78	61,78	69,64				1,07	1,13			
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%			80,55	80,62	80,74	80,85	80,98	80,55	81,04				1	1,05			
8	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	%			30,06	30,09	30,10	30,15	30,18	18,30	18,30				0,60	0,60			
9	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%			17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50				1	1			
10	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	%			10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	20,2	38,20				2,02	1,91			
11	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Per 1000 Perempuan			81,55	85,42	89,69	94,18	98,88	58,88	97,30				0,72	1,14			
12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Per 1000 Perempuan			96,21	96,21	96,21	96,21	96,21	97,59	97,06				1,014	1,008			
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%			60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	62	65,84				1,021	1,085			
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%			38,67	38,67	38,67	38,67	38,67	41,71	42,50				1,078	1,2			
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%			2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14				1	1			
16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%			0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71				1	1			
17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan disektor non pertanian	%			0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39				1	1			
18	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)				Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	Pratama	Pratama				Pratama	Pratama			
19	Laju Pertumbuhan Penduduk				1,36	1,34	1,32	1,3	1,28	1,03	1,03				0,75	0,76			
20	Total Fertility Rate				2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,18	2,23				0,97	1			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 20 indikator kinerja pada Renstra lima tahun selama tahun 2020-2024. Dapat dilihat bahwa dari 20 indikator kinerja yang ada hampir semua indikator menunjukkan tingkat capaian kinerja hampir 50 %. Hanya pada indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG masih terbilang rendah hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Daerah yang masih belum melaksanakan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), indikator perangkat tersebut memiliki tingkat capaian yang rendah sehingga pada Penyusunan Renja tahun 2020 telah diadakan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yaitu kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE), karena dari 14 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat baru terdapat 2 Kabupaten Kota yang mendapatkan penghargaan untuk Katergoti Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Indikator ke dua yang masih memiliki tingkat capaian yang rendah yaitu indicator Persentase perempuan di lembaga legislatif. Hal ini dikarenakan masih kurangnya peran aktif perempuan dalam mengisi kedudukan yang ada di lembaga legislative, sehingga peran perempuan sepertinya masih di anggap belum maksimal didalam lembaga legislative di Kabupaten Sanggau. Dari sekian banyak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di DPRD Kab. Sanggau hanya ada 7 orang perempuan yang menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sanggau.

Untuk Indikator Persentase Jumlah Pekerja Anak di bawah umur sama sekali tidak ada capaian kinerja hal ini di karenakan bahwa di Kabupaten Sanggau sendiri tidak terdapat anak yang bekerja dibawah umur, dari hasil koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau sendiri tidak memiliki wewenang dalam pemberian data pekerja anak dibawah umur.

Indikator Rencana Strategis yang sama yaitu yang tidak memiliki capaian kinerja selama 5 tahun adalah Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar hal ini dikarenakan pada lima tahun terakhir pusat pembelajaran ini masih belum terbentuk dan akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 juga telah dibentuk Tim untuk pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sanggau.

Sedangkan untuk pelayanan yang telah tercapai salah satunya yaitu Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendapat perlindungan hukum. Perempuan dan anak tindak korban kekerasan telah berani melapor kepada aparat penegak hukum melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai sarana dalam memfasilitasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan anak, sehingga hampir semua kasus tindak kekerasan yang terjadi dapat ditangani sesuai standar yang ada baik melalui mediasi dan aparat penegak hukum. Diharapkan dengan adanya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.6

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuha	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Angga ran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	5.724.686.234	5.500.246.527	7.229.869.601	10.783.306.502	13.410.978.015	5.610.995.311	5.286.927.624	6.819.817.241	9.565.048.661	10.952.208.564	98,01	96,12	94,34	88,7	81,67	0,25	0,19
Belanja Modal	1.327.275.000	1.525.067.646	1.346.171.262	826.793.000	1.508.050.250	1322408000	1.410.260.650	1.233.855.362	797.302.000	1.360.702.250	99,63	92,47	91,66	96,43	90,23	0,12	0,07
Belanja Tak Terduga																	
Jumlah	7.052.261.234	7.025.314.173	8.576.040.863	11.610.099.502	14.919.028.265	6.933.403.311	6.697.188.274	8.053.672.603	10.362.350.661	12.312.910.814	-	189	186	185	172	0,21	0,16
*) diisi dengan nama Perangkat Daerah																	
***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah																	

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sanggau

uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Operasi	13.490.232.828	17.053.336.587	0	0	0	11.320.489.265	14.530.335.701	0	0	0	98,01	96,12	0	0	0	-0,24	0,28
Belanja Modal	613.301.000	1.543.434.738	0	0	0	544.181.000	1.493.248.600	0	0	0	99,63	92,47	0	0	0	1,02	1,74
Belanja Tak Terduga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Jumlah	14.103.533.828	18.596.771.325	0	0	0	11.864.670.265	16.023.584.301	0	0	0	198	189	-	-	-	-0,18	0,35

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja operasi sebesar 0,25% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,19 % pertahun selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2020-2024 sedangkan untuk belanja modal rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,12% dan pertumbuhan realisasi belanja modal sebesar 0,07% hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas personil (sumber daya manusia) yang ada di Kecamatan seperti kurangnya tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang telah banyak memasuki masa pensiun sehingga banyak belanja modal yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya tenaga lapangan tersebut. Selain kurangnya tenaga PLKB yang telah banyak memasuki masa pensiun, untuk kebutuhan sumber daya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana juga masih banyak terdapat kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga kurang optimalnya dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk kebutuhan Sumber Daya Manusia sendiri telah diusulkan melalui telaahan staf guna mencukupi kebutuhan pegawai lapangan dan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mengalami beberapa kali Refocusing Anggaran yang merupakan Dampak adanya Pandemi Covid-19, sehingga pagu anggaran yang ada pada tahun anggaran 2020 juga digunakan untuk penanganan pandemi covid-19. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2020 masuk dalam Satgas penanganan Pandemi Covid -19 sehingga pada tahun anggaran 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendapatkan Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) sebanyak Rp. 12.450.161.000,- dan

teralisasi sebesar Rp. 9.765.120.500,- dimana Dana Tak Terduga ini di pergunakan untuk :

1. Bantuan Beras bagi masyarakat terkena dampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sanggau 20.863 KPM
2. Fasilitasi Bantuan kepada WNIB/TKI Mandiri Dampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sanggau, tapi tidak dilaksanakan karena merupakan ranah dari Dinas Sosial Provinsi.
3. Sewa Mobilitas Darat dari Kecamatan ke Desa untuk Distribusi Beras Kegiatan Bantuan Beras bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 di Kabupaten.

Selain Dana Tak Terduga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau juga mendapat Bantuan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 7.671.771.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.585.554.250,- atau sebesar 98,88%. Dana Insentif Daerah ini dipergunakan untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin seperti Bantuan Kelompok Usaha Bersama serta bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hal ini dikarenakan Anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 mengalami Refocusing akibat dampak Covid-19 sehingga target Kinerja untuk Rumah Tidak Layak Huni juga mengalami penurunan dari 46 Rumah Tidak Layak Huni menjadi 20 Rumah Tidak Layak Huni. Dengan adanya Dana Insentif Daerah sangat membantu dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin yang terkena dampak Covid-19.

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien guna mencapai

tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah. Selain itu, belanja daerah juga diproyeksikan meningkat dengan prediksi anggaran defisit dan menurun setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kebijakan Kabupaten Sanggau di tahun mendatang sebagai berikut:

1. Prinsip *money follow function, money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*.
2. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan mempercepat penyerapan anggaran untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.
4. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja.
5. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
6. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dioptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD, antara OPD dengan instansi sektoral maupun antara OPD Kabupaten Sanggau dengan OPD

Provinsi Kalimantan Barat berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.

8. Untuk meningkatkan kinerja ASN dan penerapan asas keadilan, pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sanggau akan mengurangi Belanja Pegawai berupa honorarium pada Belanja Langsung untuk dialihkan ke Tunjangan Kinerja Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik.

Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

1. Memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran.
2. Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha Perusahaan Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori; kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT), adapun identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal, meliputi :

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana lima tahun mendatang.

1. Kekuatan (Strenght)

Beberapa factor kekeuatan yang dapat memberikan dorongan positif demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk adalah sebagai berikut :

- b. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
- c. Motovasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung demi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sanggau.

2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa faktor kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya tenaga professional yang tersedia sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal .
- b. Fasilitasi sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai, hal ini berpengaruh terhadap proses pelayanan dan rehabilitasi.

C. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman diluar Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang berpengaruh dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam lima tahun mendatang. Peluang dan ancaman tersebut adalah :

1. Peluang (Opportunities)

- Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan dan penanganan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
- Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya susunan

Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sebagai landasan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi kegiatan tersebut.

2. Ancaman (Threats)

- ❖ Meningkatnya PMKS di Kabupaten Sanggau , dengan demikian menimbulkan kerentanan akan angka kemiskinan, hal ini merupakan mata rantai kemiskinan yang ada apabila rantai kemiskinan ini tidak diputus.
- ❖ Kabupaten Sanggau merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan sangat rentan terjadinya perdagangan orang serta terjadi perpindahan penduduk dan mata pencaharian untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan PMKS di Kabupaten Sanggau.

3. Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginteraksi faktor0faktor internal dan eksternal melalui analisi SWOT sebagai berikut:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah:
 - a) Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan

mengatasi ancaman (ST) adalah :

- a) Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
 - b) Memanfaatkan semangat dan motivasi aparaturnya agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul dimasyarakat baik masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah:
- a) Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
 - b) Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
- a) Tingkatkan Profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru serta penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - b) Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS.

Tabel 2.7

Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

INTERNAL KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)	➤ Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan ➤ Motivasi yang tinggi dimiliki dari aparatut Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.	➤ Terbatasnya tenaga profesioanal yang tersedia ➤ Fasilitasi sarana dan prasarana dibidang pelayan an belum memadai
PELUANG (O) ➤ Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	STRATEGI S+O ➤ Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partidipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan msayarakat. ➤ Optimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas melalui aparatut yang ada dalam	STRATEGI W+O ➤ Tingkatkan profesionalisme aparatut pemerintah dan mitra kerja peran masyarakat dalam pembangunan. ➤ Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraaa

Berencana ➤ Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya SOTK Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sebagai landasan bekerja sesuai Tugas pokok dan fungsinya.	menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana .	n kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
TANGTANGAN (T) ➤ Tingginya angka PMKS ➤ Kabupaten Sanggau merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.	STRATEGI S+O ➤ Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintahan daerah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. ➤ Memanfaatkan semangat dan motivasi aparatur untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul didalam masyarakat dalam pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	STRATEGI W+T ➤ Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu dalam penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ➤ Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Table 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Dal – Duk Angka Kelahiran / Fertilitas -> TFR	Bidang dalduk tidak ada laporan tentang kelahiran	Tidak ada Laporan Kelahiran , perolehan angka kelahiran berkoordinasi dengan sumber data OPD Dinkes.
Kevalidan Data	Bansos tidak tepat	NIK tidak Valid

	sasaran	
ODGJ yang terlantar tidak dapat langsung di rujuk ke RSJ karena diharuskan melengkapi dokumen kependudukan dan kepersertaan BPJS	Belum tersedianya shelter / rumah singgah untuk ODGJ	Belum tersedianya rumah singgah/ shelter adalah untuk tempat tinggal sementara ODGJ sebelumnya dirujuk ke RSJ dan penampungan sementara ODGJ yang belum dapat di jemput keluarganya dan pemulangan ke lingkungan asal tinggalnya.
Terbatasnya ruang / Gudang logistic untuk penanganan bencana di Kabupaten Sanggau dikarenakan Gudang/ ruang yang ada merupakan bangunan eks LBK yang tidak layak dan mengalami kerusakan sehingga lumbung social tidak aman dari serangan tikus dan kebocoran Ketika hujan	Belum tersedianya Gudang untuk penyimpan logistik Lembaga sosial Kabupaten yang Refesentatif	Belum tersedianya ruang atau Gudang yang memadai sebagai penyimpanan logistik / lumbung social dapat menjaga bantuan makanan dan lain lain menjadi aman serta dapat di pergunakan untuk penanganan bencana di kabupaten Sanggau.
Keterwakilan perempuan di bidang Politik sangat kecil khusus di Legislatif	Diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan	1. Masih kurangnya Sosialisasi secara berkala dikalangan perempuan yang punya potensi seperti kader-kader di kecamatan untuk membangkitkan

	gender.	semangat juang perempuan, khususnya pada kecamatan yang memilih perempuannya rendah.
		2. Masih kurangnya Sosialisasi secara berkala dikalangan perempuan yang punya potensi seperti kader-kader di kecamatan untuk membangkitkan semangat juang perempuan, khususnya pada kecamatan yang memilih perempuannya rendah. 3. Masih kurangnya daya minat perempuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia,peningkatkan keterwakilan dalam posisi strategis pada kekuasaan, partisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan, dan sinergitas.
Masih kurangnya pengetahuan sadar Hukum kaum perempuan	Masih banyak permasalahan perempuan yang berkaitan dengan	1. Masih jarangnya sosilisasi yang dilakukan ke kecamatan, desa/kelurahan yang

	hukum.	berkaitan dengan pengetahuan dan sadar hukum perempuan 2. Minimnya keadilan yang diadapat oleh kaum perempuan. 3. Masih banyak perempuan yang masih terlibat dalam proses hukum.
Minimnya keterwakilan perempuan di bidang Sosial kemasyarakatan.	Pentingnya kaum perempuan ikut berperan dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan.	1. Kurangnya keterlibatan/mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat, seperti relawan khusus perempuan untuk memudahkan identifikasi. 2. Belum adanya pembentukan keanggotaan dalam komunitas perempuan di setiap kecamatan,desa/kelurahan.
Masih minimnya pelaku usaha perempuan di berbagai sektor Ekonomi.	Kaum perempan belum sadar bahwa perempuan dinilai memiliki potensi untuk berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian	Masih kurangnya berbagai macam jenis pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan produkrifitas ekonomi perempuan dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan.

	keluarga.	
Masih belum terlaksananya perencanaan penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap perangkat daerah/ Lembaga masyarakat.	Perangkat daerah / Lembaga masyarakat belum melaksanakan perencanaan penganggaran Responsif Gender (PPRG).	1. Belum ada Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga Masyarakat yang melaksanakan penganggaran Responsif Gender (PPRG). 2. Belum pernah mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender. 3. Belum Pernah diadakannya Pelatihan / Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sanggau.

Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten / Kota	Belum optimalnya Kabupaten/Kota memenuhi capaian indikator pemenuhan hak anak > 300.	1. Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi Lembaga pemerintah,non pemerintah, dan dunia usaha. 2. Belum optimalnya kinerja dan jejaring Lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsive hak anak (penghambat : Rendahnya prigram kegiatan yang responsive hak anak di Kecamatan).
Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak	Kasus Kekerasan terhadap anak masih tinggi.	1. Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. 2. Belum optimalnya kualitas layanan Lembaga penyedia layanan penanganan korban anak

		(Penghambat : Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pelayanan terpadu).
Belum tersedianya data informasi gender dan anak sesuai ketentuan yang berlaku.	Pengumpulan data gender dan anak belum sinkron.	Belum optimalnya ketersedianya data informasi gender dan anak.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Sanggau 2019–2024 merupakan implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2019–2024 yaitu :

“Sanggau Maju dan Terdepan”

Maju, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik.

Terdepan, Merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 tersebut didukung misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju **Sanggau Maju dan Terdepan**, sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.
8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mendukung pencapaian misi ke 2 (Dua) yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing dan misi ke empat memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama DINSOSP3AKB yang harus dicapai 5 (lima tahun kedepan) adalah:

1. Meningkatnya Persentase PMKS yang tertangani
2. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak
3. Meningkatnya penduduk yang ber KB

4. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
5. Meningkatnya kualitas laporan kinerja tahunan
6. Meningkatnya kualitas kinerja pegawai

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:

3.2 Telaahan Renstra Sosial/BKKBN, Kementerian PPPA dan Renstra DINSOSP3AKB Provinsi Kalimantan Barat

3.3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Kementerian Sosial Republik Indonesia) Dengan Rencana Strategis DINSOSP3AKB

Untuk meningkatkan peran sektor Sosial sebagai penghela pembangunan nasional, Kementerian Sosial pada periode 2020 – 2024 telah menetapkan visi Kementerian social selama 5 tahun, yaitu **“Kementerian Sosial yang andal, professional dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan visi Presiden dan wakil Presiden: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”** Target utama penetapan visi pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan Dua sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan Rentan, 2) Sistem penyelenggaraan Kesejahteraan social yang profesional. Hal ini menjadi panduan bagi Kementrian Sosial dalam penyusunan rencana strategis ke depan. Dari penjelasan diatas, keterkaitan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan Kementerian Sosial sama-sama berperan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memiliki arah kebijakan yaitu:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggaraan Kesejahteraan social.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur dan Organisasi Kementrian Negara, Departemen Sosial berubah menjadi Kementrian Sosial Republik Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat Meningkatkan Efisiensi dan Produktifitas Kerja pada Kementrian Sosial.

Pada saat Renstra Kementrian Sosial disusun, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementrian Sosial masih dalam pembahasan dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SOTK yang diusulkan tersebut menyesuaikan Unsur-unsur Fungsi dan Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Visi Kementrian Sosial adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”**.

Visi ini mengandung arti bahwa Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu Kondisi Masyarakat yang masuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Berkesejahteraan Sosial pada Tahun 2014.

Kondisi ini merupakan tujuan yang Realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun. Pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Warga Negara agar dapat Hidup Layak dan mampu Mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya.

Secara Konstitusional, Visi ini merupakan Jawaban terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, dimana Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Pelihara oleh Negara. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan Penjelasan bagaimana cara Mensejahterakan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan Proteksi terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar, dimana kedua kelompok sasaran ini termasuk kedalam PMKS. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan Sosial PMKS termasuk didalamnya Fakir Miskin dan Anak Terlantar. MDG'S Merupakan Kesepakatan Komunitas Internasional terhadap Penurunan Angka Kemiskinan, dimana Indonesia ikut menandatangani.

Dengan Konstitusi Negara yang didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen SDGS tersebut yang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Angka Kemiskinan sesuai dengan SDGS.

Dengan demikian, Visi Kementrian Sosial sebagaimana tersebut diatas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.11 Tahun 2009 dan Undang-Undang lainnya, serta SDGS yang harus dicapai pada tahun 2021. Oleh Karena itu perlu ada Komitmen kuat dari Pemangku Kepentingan untuk mewujudkan Visi tersebut.

Sebagai Kementrian, Kementrian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dapat mencapai hasil yang Optimal

sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, kementerian Sosial menetapkan Misi Sebagai berikut :

1. Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial untuk Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
2. Mengembangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggaraan Perlindungan Sosial dalam bentuk bantuan Sosial, Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagai Metode Penanggulangan Kemiskinan.
4. Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Sosial dalam Perlindungan, Jaminan, Pemberdayaan, Rehabilitasi dan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Meningkatkan dan melestarikan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial untuk menjamin keberlanjutan peran Kesejahteraan Sosial.
6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial.
2. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran).

4. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah.
5. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
6. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia non potensial, eks-penderita penyakit kronis dan penyandang cacat psiketik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.
7. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian	Belum Optimalnya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Kurangnya Sinergitas Dan Komitmen Stakeholder (Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat) Dalam Penanganan PMKS	Dijadikannya Program Penanganan PMKS Sebagai Prioritas Pemerintah Daerah Bekerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat

2	meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial	Belum Terbangunnya System Perlindungan Dan Jaminan Sosial	System Perlindungan Dan Jaminan Sosial Belum Keseluruhannya Terintegritasi Sedangkan Permasalahan PMKS Selalu Ada	Ketersediaan Pembiayaan Guna Pendanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Dan Pemberdayaan PMKS
3	meningkatkan budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi			
4	meningkatkan budaya inovasi di masyarakat			

3.3.2. Telaahan Renstra BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terhadap Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB,
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan.
- d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga.
- e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).
- f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB.

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Permasalahan Pelayanan Dinasosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Sarana Dan Prasarana Pendukung Program KB Belum Memadai	Belum tersedianya kebijakan (Peraturan Daerah/peraturan kepala daerah)yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	Adanya Dukungan Stakeholder Terkait
2	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	Belum Optimalnya Pelaksanaan Advokasi Dan KIE (Komunikasi, Informasi Dan Komunikasi)	Tidak Seimbangnya Ketersediaan Alkon MKJP Dan Non MKJP	Adanya Komitmen Pemerintah
3	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Masih Rendahnya Akseptor Dan Partisipasi	Kurangnya Pemahaman Kaum Pria Menjadi Akseptor KB	Pelaksanaan KIE
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet)	Masih Kurangnya Sumber Daya	Tidak Adanya Rekrutmen PLKB	Usulan Penambahan PLKB

	need)	Manusia Petugas Lapangan Keluarga Berencana		
5	Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Belum Optimalnya System Pencatatan Dan Pelaporan Pengendalian Penduduk	Kurang Tersedianya SDM Yang Menguasai IT	Pelatihan Dan Bimtek
6	Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)			

3.3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terhadap Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi ke-4 pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, dan Nawacita ke-5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan visi nasional di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA mendukung pencapaian unsur visi Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yaitu terciptanya kondisi sebagai berikut:

- a. Kesetaraan Gender
- b. Keadilan Gender
- c. Perlindungan Perempuan

- d. Pemenuhan Hak Anak
- e. Pemenuhan Khusus Hak Anak

Tabel 3.3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan	Kurangnya Komitmen Dalam Pelaksanaan Regulasi Dan Kebijakan PUG	Adanya Formulasi Kebijakan Yang Responsif Gender Dari Semua Pihak
2	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Pembangunan responsif gender belum maksimal		
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai		
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Belum optimalnya sarana, prasarana dan penanganan		

		terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		
5	Meningkatnya Kabupaten – Kota yang mampu memenuhi hak anak	Belum maksimalnya Advokasi, KIE perempuan dan anak		
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PPPA			
7	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kementerian PPPA	Belum Optimalnya Penerapan System Pelayanan Publik	Sarana Prasarana	Komitmen Aparatur
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			

3.3.4.Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi terhadap permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Tabel 3.3.4

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Beserta Penghambat dan
Pendukung**

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kal.bar	Permasalahan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan	Kurangnya Komitmen Dalam Pelaksanaan Regulasi Dan Kebijakan PUG	Adanya Formulasi Kebijakan Yang Responsif Gender Dari Semua Pihak
2.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Pembangunan responsif gender belum maksimal		
3.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai		
4.	Meningkatnya ketersediaan data dan partisipasi masyarakat	Belum optimalnya sarana, prasarana dan penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		
		Belum maksimalnya		

		Advokasi, KIE perempuan dan anak		
--	--	----------------------------------	--	--

3.3.5.Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi terhadap permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Tabel 3.3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Sosial Kal.bar	Permasalahan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan bagi PMKS dan masyarakat, dengan indikator: Jumlah PMKS dan masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pelayanan.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Kurangnya Sinergitas Dan Komitmen Stakeholder (Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat) Dalam Penanganan PMKS	Dijadikannya Program Penanganan PMKS Sebagai Prioritas Pemerintah Daerah Bekerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat
2	Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan pembinaan terhadap LKS dan penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya, dengan indikator : Jumlah LKS dan penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya yang mendapatkan pemantauan, pengendalian dan	Belum Terbangunnya System Perlindungan Dan Jaminan Sosial	System Perlindungan Dan Jaminan Sosial Belum Keseluruhannya Terintegritasi Sedangkan Permasalahan PMKS Selalu Ada	Ketersediaan Pembiayaan Guna Pendanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Dan Pemberdayaan PMKS

	pembinaan			
--	-----------	--	--	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 berpedoman pada RTRW Kabupaten Sanggau tahun 2014-2034, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sanggau dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Hal ini dilakukan untuk menjamin arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau selama lima tahun kedepan tidak bertentangan dengan kebijakan RTRW Kabupaten Sanggau. Arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau disusun dan dilaksanakan untuk mendukung implementasi kebijakan RTRW secara efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dokumen RPJMD tahun 2019-2024 dan dokumen RTRW Kabupaten Sanggau merupakan kedua dokumen pembangunan daerah yang saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sanggau yang berkelanjutan.

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui

penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

KLHS RPJMD Kabupaten Sanggau memuat hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 disesuaikan dengan kewenangan daerah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hasil analisis terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Sanggau yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan alternatif proyeksi, baik tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan guna merealisasikan TPB sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Untuk itu selama 5 (lima) tahun ke depan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, isu-isu strategis Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Kualitas pendidikan;
2. Kualitas kesehatan;
3. Kualitas infrastruktur;
4. Kemiskinan dan pengangguran;

5. Kualitas pelayanan sosial dan gender;
6. Wilayah perbatasan dan kawasan strategis;
7. *Good governance*, penegakan regulasi dan penguatan reformasi birokrasi; dan
8. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Maka terdapat 3 (tiga) isu permasalahan SPM bidang Sosial pada tahun 2019. Adapun Isu SPM Bidang Sosial Adalah :

1. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti.
2. Penyediaan dan peningkatan sarana dan parasana dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Jumlah Korban Bencana Kab/Kota yang dilayani.

3.5.1. Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah
2. Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
3. Meningkatnya Angka Pertumbuhan Penduduk

Seperti telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi agar dapat diakomodir dengan fokus untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang Maju dan Terdepan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Table 3.1
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
 Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Dal – Duk Angka Kelahiran / Fertilitas -> TFR	Bidang dalduk tidak ada laporan tentang kelahiran	Tidak ada Laporan Kelahiran , perolehan angka kelahiran berkoordinasi dengan sumber data OPD Dinkes.
Kevalidan Data	Bansos tidak tepat sasaran	NIK tidak Valid
ODGJ yang terlantar tidak dapat langsung di rujuk ke RSJ kerena diharukan melengkapi dokumen kependudukan	Belum tersedianya shelter / rumah singgah untuk ODGJ	Belum tersedianya rumah singgah/ shelter adalah untuk tempat tinggal sementara ODGJ sebelumnya dirujukke RSJ dan penampungan sementara ODGJ yang belum

dan kepersertaan BPJS		dapat di jemput keluarganya dan pemulangan ke lingkungan asal tinggalnya.
Terbatasnya ruang / Gudang logistic untuk penanganan bencana di Kabupaten Sanggau dikarenakan Gudang/ ruang yang ada merupakan bangunan eks LBK yang tidak layak dan mengalami kerusakan sehingga lumbung social tidak aman dari serangan tikus dan kebocoran Ketika hujan	Belum tersedianya Gudang untuk penyimpan logistik Lembaga sosial Kabupaten yang Refesentatif	Belum tersedianya ruang atau Gudang yang memadai sebagai penyimpanan logistik / lumbung social dapat menjaga bantuan permakanaan dan lain lain menjadi aman serta dapat di pergunakan untuk penanganan bencana di kabupaten Sanggau.
Keterwakilan perempuan di bidang Politik sangat kecil khusus di Legislatif	Diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.	1. Masih kurangnya Sosialisasi secara berkala dikalangan perempuan yang punya potensi seperti kader-kader di kecamatan untuk membangkitkan semangat juang perempuan, khususnya pada kecamatan yang pemilih perempuannya rendah.
		2. Masih kurangnya Sosialisasi secara berkala dikalangan perempuan yang punya potensi seperti

		kader-kader di kecamatan untuk membangkitkan semangat juang perempuan, khususnya pada kecamatan yang memilih perempuannya rendah. 3. Masih kurangnya daya minat perempuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia,peningkatkan keterwakilan dalam posisi strategis pada kekuasaan, partisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan, dan sinergitas.
Masih kurangnya pengetahuan sadar Hukum kaum perempuan	Masih banyak permasalahan perempuan yang berkaitan dengan hukum.	1. Masih jarangnya sosialisasi yang dilakukan ke kecamatan, desa/kelurahan yang berkaitan dengan pengetahuan dan sadar hukum perempuan 2. Minimnya keadilan yang diadapat oleh kaum perempuan. 3. Masih banyak perempuan yang masih terlibat dalam proses hukum.
Minimnya keterwakilan perempuan di	Pentingnya kaum perempuan ikut	1. Kurangnya keterlibatan/mengikut

bidang Sosial kemasyarakatan.	berperan dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan.	sertakan perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat, seperti relawan khusus perempuan untuk memudahkan identifikasi. 2. Belum adanya pembentukan keanggotaan dalam komunitas perempuan di setiap kecamatan, desa/kelurahan.
Masih minimnya pelaku usaha perempuan di berbagai sektor Ekonomi.	Kaum perempuan belum sadar bahwa perempuan dinilai memiliki potensi untuk berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga.	Masih kurangnya berbagai macam jenis pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan.
Masih belum terlaksananya perencanaan penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap perangkat daerah/ Lembaga masyarakat.	Perangkat daerah / Lembaga masyarakat belum melaksanakan perencanaan penganggaran Responsif Gender (PPRG).	1. Belum ada Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga Masyarakat yang melaksanakan penganggaran Responsif Gender (PPRG). 2. Belum pernah mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender. 3. Belum Pernah diadakannya Pelatihan / Bimbingan Teknis

		Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sanggau.
Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten / Kota	Belum optimalnya Kabupaten/Kota memenuhi capaian indikator pemenuhan hak anak > 300.	1. Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha. 2. Belum optimalnya kinerja dan jejaring Lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsive hak anak (penghambat : Rendahnya prigram kegiatan yang responsive hak anak di Kecamatan).
Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak	Kasus Kekerasan terhadap anak masih tinggi.	1. Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. 2. Belum optimalnya kualitas layanan Lembaga penyedia layanan penanganan korban anak (Penghambat : Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pelayanan terpadu).
Belum tersedianya data informasi gender dan anak sesuai	Pengumpulan data gender dan anak belum sinkron.	Belum optimalnya ketersedianya data informasi gender dan anak.

ketentuan yang berlaku.		
-------------------------	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Sanggau 2019–2024 merupakan implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2019–2024 yaitu :

“Sanggau Maju dan Terdepan”

Maju, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik.

Terdepan, Merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 tersebut didukung misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju **Sanggau Maju dan Terdepan**, sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing.

3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.
8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mendukung pencapaian misi ke 2 (Dua) yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing dan misi ke empat memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama DINSOSP3AKB yang harus dicapai 5 (lima tahun kedepan) adalah:

1. Meningkatnya Persentase PMKS yang tertangani
2. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak
3. Meningkatnya penduduk yang ber KB
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
5. Meningkatnya kualitas laporan kinerja tahunan
6. Meningkatnya kualitas kinerja pegawai

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:

3.2 Telaahan Renstra Sosial/BKKBN, Kementerian PPPA dan Renstra DINSOSP3AKB Provinsi Kalimantan Barat

3.3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Kementerian Sosial Republik Indonesia) Dengan Rencana Strategis DINSOSP3AKB

Untuk meningkatkan peran sektor Sosial sebagai penghela pembangunan nasional, Kementerian Sosial pada periode 2020 – 2024 telah menetapkan visi Kementerian social selama 5 tahun, yaitu **“Kementerian Sosial yang andal, professional dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan visi Presiden dan wakil Presiden: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. ”**.Target utama penetapan visi pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan Dua sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan Rentan, 2) Sistem penyelenggaraan Kesejahteraan social yang profesional. Hal ini menjadi panduan bagi Kementrian Sosial dalam penyusunan rencana strategis ke depan.Dari penjelasan diatas, keterkaitan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan Kementerian Sosial sama-sama berperan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memiliki arah kebijakan yaitu:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggaraan Kesejahteraan social.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur dan Organisasi Kementrian Negara, Departemen Sosial berubah menjadi Kementrian Sosial Republik Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat Meningkatkan Efisiensi dan Produktifitas Kerja pada Kementrian Sosial.

Pada saat Renstra Kementrian Sosial disusun, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementrian Sosial masih dalam pembahasan dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SOTK yang diusulkan tersebut menyesuaikan Unsur-unsur Fungsi dan Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Visi Kementrian Sosial adalah ***“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”***.

Visi ini mengandung arti bahwa Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu Kondisi Masyarakat yang masuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Berkesejahteraan Sosial pada Tahun 2014.

Kondisi ini merupakan tujuan yang Realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun. Pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Warga Negara agar dapat Hidup Layak dan mampu Mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya.

Secara Konstitusional, Visi ini merupakan Jawaban terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, dimana Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Pelihara oleh Negara. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan Penjelasan bagaimana cara Mensejahterakan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan Proteksi terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar, dimana kedua kelompok sasaran ini termasuk kedalam PMKS. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan Sosial PMKS termasuk didalamnya Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

MDG’S Merupakan Kesepakatan Komunitas Internasional terhadap Penurunan Angka Kemiskinan, dimana Indonesia ikut menandatangani.

Dengan Konstitusi Negara yang didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen SDGS tersebut yang ditujukan bagi PMKS.

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Angka Kemiskinan sesuai dengan SDGS.

Dengan demikian, Visi Kementrian Sosial sebagaimana tersebut diatas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.11 Tahun 2009 dan Undang-Undang lainnya, serta SDGS yang harus dicapai pada tahun 2021. Oleh Karena itu perlu ada Komitmen kuat dari Pemangku Kepentingan untuk mewujudkan Visi tersebut.

Sebagai Kementrian, Kementrian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dapat mencapai hasil yang Optimal sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, kementrian Sosial menetapkan Misi Sebagai berikut :

1. Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial untuk Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
2. Mengembangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggaraan Perlindungan Sosial dalam bentuk bantuan Sosial, Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagai Metode Penanggulangan Kemiskinan.
4. Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Sosial dalam Perlindungan, Jaminan, Pemberdayaan, Rehabilitasi dan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Meningkatkan dan melestarikan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial untuk menjamin keberlanjutan peran Kesejahteraan Sosial.
6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial.
2. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran).
4. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah.
5. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
6. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia non potensial, eks-penderita penyakit kronis dan penyandang cacat psiketik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.
7. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
-----	---	---	-------------------	------------------

	Sosial Republik Indonesia			
1	meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian	Belum Optimalnya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Kurangnya Sinergitas Dan Komitmen Stakeholder (Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat) Dalam Penanganan PMKS	Dijadikannya Program Penanganan PMKS Sebagai Prioritas Pemerintah Daerah Bekerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat
2	meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial	Belum Terbangunnya System Perlindungan Dan Jaminan Sosial	System Perlindungan Dan Jaminan Sosial Belum Keseluruhannya Terintegritasi Sedangkan Permasalahan PMKS Selalu Ada	Ketersediaan Pembiayaan Guna Pendanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Dan Pemberdayaan PMKS
3	meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi			
4	meningkatkan budaya inovasi di masyarakat			

3.3.2. Telaahan Renstra BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terhadap Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara

konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB,
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan.
- d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga.
- e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).
- f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan,

KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB.

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Sarana Dan Prasarana Pendukung Program KB Belum Memadai	Belum tersedianya kebijakan (Peraturan Daerah/peraturan kepala daerah)yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	Adanya Dukungan Stakeholder Terkait
2	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	Belum Optimalnya Pelaksanaan Advokasi Dan KIE (Komunikasi, Informasi Dan Komunikasi)	Tidak Seimbangnya Ketersediaan Alkon MKJP Dan Non MKJP	Adanya Komitmen Pemerintah
3	Meningkatnya pemakaian	Masih Rendahnya	Kurangnya Pemahaman	Pelaksanaan KIE

	kontrasepsi (CPR)	Akseptor Dan Partisipasi	Kaum Pria Menjadi Akseptor KB	
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Tidak Adanya Rekrutmen PLKB	Usulan Penambahan PLKB
5	Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Belum Optimalnya System Pencatatan Dan Pelaporan Pengendalian Penduduk	Kurang Tersedianya SDM Yang Menguasai IT	Pelatihan Dan Bimtek
6	Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)			

3.3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terhadap Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi ke-4 pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, dan Nawacita ke-5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan visi nasional di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA mendukung pencapaian unsur visi Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yaitu terciptanya kondisi sebagai berikut:

- a. Kesetaraan Gender
- b. Keadilan Gender

- c. Perlindungan Perempuan
- d. Pemenuhan Hak Anak
- e. Pemenuhan Khusus Hak Anak

Tabel 3.3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan	Kurangnya Komitmen Dalam Pelaksanaan Regulasi Dan Kebijakan PUG	Adanya Formulasi Kebijakan Yang Responsif Gender Dari Semua Pihak
2	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Pembangunan responsif gender belum maksimal		
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai		
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Belum optimalnya sarana, prasarana dan penanganan terhadap		

		tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		
5	Meningkatnya Kabupaten – Kota yang mampu memenuhi hak anak	Belum maksimalnya Advokasi, KIE perempuan dan anak		
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PPPA			
7	Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kementerian PPPA	Belum Optimalnya Penerapan System Pelayanan Publik	Sarana Prasarana	Komitmen Aparatur
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			

3.3.4.Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi terhadap permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Tabel 3.3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kal.bar	Permasalahan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan	Kurangnya Komitmen Dalam Pelaksanaan Regulasi Dan Kebijakan PUG	Adanya Formulasi Kebijakan Yang Responsif Gender Dari Semua Pihak
2.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Pembangunan responsif gender belum maksimal		
3.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai		
4.	Meningkatnya ketersediaan data dan partisipasi masyarakat	Belum optimalnya sarana, prasarana dan		

		penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		
		Belum maksimalnya Advokasi, KIE perempuan dan anak		

3.3.5.Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi terhadap permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Tabel 3.3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Beserta Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Sosial Kal.bar	Permasalahan Pelayanan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan bagi PMKS dan masyarakat, dengan indikator: Jumlah PMKS dan masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pelayanan.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Kurangnya Sinergitas Dan Komitmen Stakeholder (Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat) Dalam Penanganan PMKS	Dijadikannya Program Penanganan PMKS Sebagai Prioritas Pemerintah Daerah Bekerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat
2	Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan pembinaan terhadap LKS dan penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya,	Belum Terbangunnya System Perlindungan Dan Jaminan Sosial	System Perlindungan Dan Jaminan Sosial Belum Keseluruhannya Terintegritasi Sedangkan Permasalahan	Ketersediaan Pembiayaan Guna Pendanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Serta Penanganan

	dengan indikator : Jumlah LKS dan penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya yang mendapatkan pemantauan, pengendalian dan pembinaan		PMKS Ada	Selalu	Dan Pemberdayaan PMKS
--	--	--	----------	--------	-----------------------

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 berpedoman pada RTRW Kabupaten Sanggau tahun 2014-2034, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sanggau dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Hal ini dilakukan untuk menjamin arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau selama lima tahun kedepan tidak bertentangan dengan kebijakan RTRW Kabupaten Sanggau. Arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau disusun dan dilaksanakan untuk mendukung implementasi kebijakan RTRW secara efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dokumen RPJMD tahun 2019-2024 dan dokumen RTRW Kabupaten Sanggau merupakan kedua dokumen pembangunan daerah yang saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sanggau yang berkelanjutan.

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,

dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

KLHS RPJMD Kabupaten Sanggau memuat hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 disesuaikan dengan kewenangan daerah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hasil analisis terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Sanggau yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan alternatif proyeksi, baik tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan guna merealisasikan TPB sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Untuk itu selama 5 (lima) tahun ke depan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, isu-isu strategis Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Kualitas pendidikan;
2. Kualitas kesehatan;
3. Kualitas infrastruktur;

4. Kemiskinan dan pengangguran;
5. Kualitas pelayanan sosial dan gender;
6. Wilayah perbatasan dan kawasan strategis;
7. *Good governance*, penegakan regulasi dan penguatan reformasi birokrasi; dan
8. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Maka terdapat 3 (tiga) isu permasalahan SPM bidang Sosial pada tahun 2019. Adapun Isu SPM Bidang Sosial Adalah :

1. Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti.

2. Penyediaan dan peningkatan sarana dan parasana dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Jumlah Korban Bencana Kab/Kota yang dilayani.

3.5.1. Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah
2. Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
3. Meningkatnya Angka Pertumbuhan Penduduk

Seperti telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi agar dapat diakomodir dengan fokus untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang Maju dan Terdepan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah DINSOSP3AKB

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki 3 tujuan diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender
3. Terkendalinya Laju Penduduk
4. Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah DINSOSP3AKB

1. Meningkatnya Kemandirian PPKS
2. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak
3. Meningkatnya Keberhasilan Ber-KB
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut diatas terdapat indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

4.1.3. Indikator

1. Indikator tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana :

1. Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Laju Pertumbuhan Penduduk

4. Nilai SAKIP

**2. Indikator sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

1. Persentase PPKS yang mandiri
2. Indeks pemberdayaan Gender (IDG)
3. Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)
4. Total Fertility Rate
5. Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kab.Sanggau

TABEL 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau		65,00%	70%	70,50%	71,00%
		Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	91,84%	92%	92,50%	93%	93, 50 %
2.	Terwujudnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Menekan Angka Kemiskinan	Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial kepada Masyarakat Miskin	4,26	4,18	4,09	4,01	4
		Meningkatnya PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat	127.010	127.937	127.937	129.256	129.256
			Cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni	23,05	41,79	60,54	79,71	100
			Meningkatnya pelayanan panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100

			Meningkatnya korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat bencana.	100	100	100	100	100
			Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensian yang telah menerima jaminan sosial	60	60	60	60	60
3.	Terwujudnya Penanganan Kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,06	30,09	30,1	30,15	30,18
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
			Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00
			Rasio KDRT	0,02	0,18	0,46	0,64	0,11
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	81,55	85,42	89,69	94,18	98,88
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100	100	100	100	100

			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah	100	100	100	100	100
			Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100
			Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
			Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
			Rasio APM Perempuan/laki-laki di SD	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21

			Rasio APM Perempuan/laki-laki di SMP	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67
			Rasio APM Perempuan/laki-laki di SMP	38,67	38,67	38,67	38,67	38,67
			Rasio APM Perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
			Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
			Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
			Indeks Pembangunan Gender	27,93	27,93	27,93	27,93	27,93
		Status Capaian Kab/Kota Layak Anak	Menuju Kabupaten Layak Anak	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA
		Meningkatnya penduduk yang ber-KB	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,36	1,34	1,32	1,3	1,28
			Total Fertility Rate	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2
			Meningkatnya Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	60%	70%	80%	90%	100%
			Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	60%	70%	80%	90%	100%

			Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	1	0	0
			Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	1	1	1	1	9
			Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	1	1	1	3
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,67	2,64	2,61	2,58	2,55
			Rasio Aseptor	66,23	68,73	71,73	76,23	76,23
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	66,23	68,73	71,23	73,73	76,23
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	86,9	84,16	81,56	79,1	76,78
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	6,06	5,76	5,47	5,2	4,94
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	9,74	9,51	9,36	9,16	9,12

			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12,26	13,5	14,65	15,65	16,35
			Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	76,74	77,24	77,74	78,24	78,74
			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84
			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2	5	8	11	15
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	20,00	20,00	30,00	35,00	35,00
			Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	169	174	174	174	174
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasespsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
			Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	66,69	66,7	66,74	66,76	66,81
			Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00
			Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
			Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

TABEL 4.2**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau		65,00%	70%	70,50%	71,00%
		Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	91,84%	91,27%	92,50%	93%	93, 50 %
2.	Terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10,15	17,50	40,00	45,00	47,25
		Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	7,50	15,00	15,00	20,00	22,50
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	80,55	80,62	80,74	80,85	80,98
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,35	61,42	61,54	61,65	61,78
			Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya
4.	Terkendalnya Laju Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,36	1,34	1,32	1,3	1,28
		Meningkatnya Keberhasilan ber-KB	Total Fertility Rate	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2

Berdasarkan tabel 4.2 diatas jika disandingkan dengan tabel 4.1 sebelumnya terlihat bahwa terjadi beberapa perubahan pada tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Dimana perubahan tersebut menyesuaikan dengan perubahan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Sanggau.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi. Keseluruhan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada lampiran tabel.

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

5.2.1 Strategi jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas penanganan PPKS

2. Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB

5.2. Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan data PPKS terpilah yang valid dan komprehensif
2. Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya
5. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta ketersediaan alat pelayanan kontrasepsi
6. Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

Berdasarkan deskripsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada perumusan tabel 5.2 sebagai berikut :

TABEL 5.1				
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN				
VISI : SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN				
MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing.				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Terwujudnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Meningkatnya PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Sosial kepada Masyarakat Miskin	1 Peningkatan kualitas pelayanan dasar sosial kepada masyarakat miskin	
Terwujudnya Penanganan Kualitas Hidup Perempuan dan Aank	1 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	1 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan diberbagai bidang	1 Peningkatan Kesetaraan Gender (KG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Pelaksanaan, Perencanaan, Responsiff Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi PPRG	
	2. Status Capaian Kabupaten Layak Anak	1. Mengembangkan Kabupaten/kota Layak Anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa serta pengembangan kelembagaan forum anak.	1. Penyediaan Regulasi, penguatan kelembagaan, sarana prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi kekurangan sesuai dengan hasil Evaluasi KLA	
	3. Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	1 Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat.	
MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintaha yang baik				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	1 Peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja	1 Meningkatkan pelaporan akuntabilitas kinerja	
	2 Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	2 Peningkatan Kelancaran pelayanan perkantoran	2 Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, serta sarana dan prasarana aparatur DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	

TABEL 5.2				
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN				
VISI : SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN				
MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing.				
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS	1	Meningkatnya Kemandirian PPKS	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Sosial kepada Masyarakat Miskin	1 Peningkatan kualitas pelayanan dasar sosial kepada masyarakat miskin
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender	1	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	1 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan diberbagai bidang	1 Peningkatan Kesetaraan Gender (KG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Pelaksanaan, Perencanaan, Responsiff Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi PPRG
			2. Mengembangkan Kabupaten/kota Layak Anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa serta pengembangan kelembagaan forum anak.	2. Penyediaan Regulasi, penguatan kelembagaan, sarana prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi kekurangan sesuai dengan hasil Evaluasi KLA
Terkendalnya Laju Penduduk	1.	Meningkatnya Keberhasilan ber-KB	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	1 Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat.
MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintaha yang baik				
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	1 Peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja	1 Meningkatkan pelaporan akuntabilitas kinerja
	2	Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	2 Peningkatan Kelancaran pelayanan perkantoran	2 Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, serta sarana dan prasarana aparatur DINSOSP3AKB Kab.Sanggau

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab VI ini fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan program prioritas rencana jangka menengah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Program prioritas tersebut selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Strategis Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 untuk dijabarkan ke dalam kegiatan. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau serta berpedoman pada program dan pendanaan indikatif dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau.

Selama lima tahun kedepan, Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau akan menjalankan program-program dalam rangka pemenuhan visi misi kepala daerah, sebagai berikut :

Program dalam rangka pemenuhan visi misi kepala daerah :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Perlindungan Perempuan
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11. Program Perlindungan Khusus Anak
12. Program Pengendalian Penduduk
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Karena terjadinya dinamisasi regulasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang semula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 di Tahun 2020 hanya ada 18 (delapan belas) program dan 60 (Enam Puluh Tiga) kegiatan, di Tahun 2021-2024 berubah menjadi 15 (Lima Belas) program, 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan dan 114 (Seratus Empat Belas) sub kegiatan.

Selanjutnya penjabaran dari semula program, kegiatan menjadi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau per sasaran strategis disajikan pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DINSOSP 3AKB		Unit Kerja a DIN SOS P3A KB Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	80 %		85 %		90 %		95 %		95 %		95 %		Kadis DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AKB

lik																			
	Me nin gka tny a Kua lita s Pel aya nan Pub lik pad a Din sos p3a kb Kab . San gga u			Persent ase ketercu kupan adminis trasi perkant oran, sarana dan prasara na aparatu r dan pelayan an prima	90, 50 %	90 ,5 0%		90 ,5 0%		95 ,2 0%		90 ,5 0%		90 ,5 0%				Kadi s DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

		1 0 0 0 0 . 6 1 6 1 .	Progra m Penunj ang Urusan Pemer intahan Daerah Kabupa ten/Ko ta	Indikat or Progra m : Keterse diaan layanan adminis trasi perkant oran yang menduk ung kelanca ran tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak dan Keluarg a Berenca na Kabupa ten Sangga u	10 0%	10 0%	5.4 05. 595 .77 4	10 0%	5.4 05. 595 .77 4	10 0%	5.7 02. 875 .55 6	10 0%	5.9 59. 674 .33 2	10 0%	6.2 57. 652 .80 0	10 0%	6.2 57. 652 .80 0	Sekr etari s DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
--	--	-----------------------------	--	---	----------	----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-------------------------------	---	-----------------------------

		0 0 0 2 0 1 6 1 1	Kegiata n Perenc anaan, Pengan ggaran dan Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah																
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 1 1 .	Penyus unan Dokum en Perenca naan Perangk at Daerah	Sasaran : Dokume n Perenca naan Dinsosp 3akb Kab.San ggau														Kas ubb ag Pere ncan aan Aku ntab ilitas Kine rja	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah Yang	3 Do k	3 Do k	9.9 52. 140	3 Do k	9.9 52. 140	3 Do k	10. 449 .74 7	3 Do k	10. 972 .23 4	3 Do k	11. 520 .84 6	3 Do k	11. 520 .84 6		

				disusun Sebanya k 3 Dokume n															
				Indikato r Hasil : Tingkat Pemenu han Dokume n Perenca naan	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 1 2 .	Koordin asi dan Penyus unan Dokum en RKA- SKPD	Sasaran : Dokume n RKA Dinsosp 3akb Kab.San ggau														Kas ubb ag Pere ncan aan Aku ntab ilitas Kine rja	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n :Jumlah Dokume n RKA SKPD yang disusun sebanya	12 Bulan	12 Bulan	28. 881 .08 3	12 Bulan	28. 881 .08 3	12 Bulan	30. 325 .13 7	12 Bulan	31. 841 .39 4	12 Bulan	33. 433 .46 3	12 Bulan	33. 433 .46 3		

				k 1 Dokume n															
				Indikato r Hasil : Tingkat Pemenu han Dokume n RKA- SKPD	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 1 3 .	Koordin asi dan Penyus unan Dokum en Peruba han RKA- SKPD	Sasaran : Dokume n Perubah an RKA- SKPD Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kas ubb ag Pere ncan aan Aku ntab ilitas Kine rja	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Perubah an RKA Yang disusun Sebanya k 1	1 Do k	1 Do k	9.1 09. 400	1 Do k	9.1 09. 400	1 Do k	9.5 64. 870	1 Do k	10. 043 .11 3	1 Do k	10. 545 .26 9	1 Do k	10. 545 .26 9	1 Dok	

				Dokume n															
				Indikato r Hasil : Tingkat pemenu han kebutuh an pemelih araan dan perizina n kendara an dinas/O perasion al	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 1 4 .	Koordin asi dan Penyus unan DPA- SKPD	Sasaran : DPA Dinsosp 3akb Kab.San ggau														Kas ubb ag Pere ncan aan Aku ntab ilitas Kine rja	DIN SO SP3 AK B

				Indikator Keluaran : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Do k	1 Do k	5.9 99. 922	1 Do k	5.9 99. 922	1 Do k	6.2 99. 918	1 Do k	6.6 19. 914	1 Do k	6.9 45. 659	1 Do k	6.9 45. 659		
				Indikator Hasil :Tingkat Pemenuhan Dokumen DPA- SKPD	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 1 5 .	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sasaran : Perubahan DPA Dinsosp 3akb Kab.Sanggau														Kasubbag Pencanaan Akuntabilitas Kinerja	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Koordinasi dan Penyusu	14 Ite m	14 Ite m	5.0 73. 950	14 Ite m	5.0 73. 950	14 Ite m	5.3 27. 647	14 Ite m	5.5 94. 029	14 Ite m	5.8 73. 731	14 Ite m	5.8 73. 731		

				nan Perubah an DPA- SKPD															
				Indikato r Hasil : Tingkat Pemenu han Dokume n Perubah an DPA- SKPD	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 1 6 .	Koordin asi dan Penyus unan Laporan Capaia n Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD	Sasaran : Dokume n Renja, Perubah an Renja, Perubah an Renstra, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP, RKT, TAPKIN dan Rencana Aksi, SPIP Dinsosp													Kas ubb ag Pere ncan aan Aku ntab ilitas Kine rja	DIN SO SP3 AK B	

				3akb Kab. Sanggau															
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, SPIP yang disusun sebanyak 2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	5.1 01. 002	2 Dok	5.1 01. 002	2 Dok	5.3 56. 052	2 Dok	5.6 23. 854	2 Dok	5.9 05. 047	2 Dok	5.9 05. 047		
				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Laporan Capaian	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, SPIP															
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 1 7 .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran : Dokumen Renja, Perubahan Renja, Perubahan Renstra, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP, RKT, TAPKIN dan Rencana Aksi, SPIP Dinsosp 3akb Kab. Sanggau															
				Indikator Keluaran :	4 Do k	4 Do k	8.4 10. 770	4 Do k	8.4 10. 770	4 Do k	8.8 31. 308	4 Do k	9.2 72. 873	4 Do k	9.7 36. 517	4 Do k	9.7 36. 517	Kas ubb ag Pere	DIN SO SP3 AK

				Tersedia nya Alat Tulis Kantor														ncan aan Aku ntab ilitas Kine rja	B
				Indikato r Hasil : Tingkat Pemenu han Alat Tulis Kantor	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		1 0 0 2 0 . 6 1 2 .	Adminis trasi Keuang an Perangk at Daerah																
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 2 1 .	Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN	Sasaran : Gaji dan Tunjang an ASN, Tunjang an Kinerja ASN, Pelaksa naan Verifikas i, Pelaksa naan															

				Akuntan si dan SPJ, Laporan Keuanga n Akhir tahun, LHP, Realisas i Fisik dan Keuanga n, Laporan Prognosi s realisasi anggara n Dinsosp 3akb Kab. Sanggau															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Gaji dan Tunjang an ASN (PNS dan P3K yang disediak an	42 Or an g	42 Or an g	3.3 99. 771 .57 8	42 Or an g	3.3 99. 771 .57 8	42 Or an g	3.5 96. 760 .15 6	42 Or an g	3.7 48. 248 .16 4	42 Or an g	3.9 35. 660 .57 2	42 Or an g	3.9 35. 660 .57 2	Kas ubb ag Keu anga n dan Aset	DIN SO SP3 AK B

				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K yang disediakan)	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 2 2 .	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sasaran : Gaji dan Tunjangan ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntansi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir tahun, LHP,													Kasubbag Keuangan dan Aset	DIN SO SP3 AK B

				Realisas i Fisik dan Keuanga n, Laporan Prognosi s realisasi anggara n Dinsosp 3akb Kab. Sanggau															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Laporan Pelaksa naan Tugas ASN yang disusun	12 Do k	12 Do k	1.6 33. 578 .61 1	12 Do k	1.6 33. 578 .61 1	12 Do k	1.7 15. 257 .54 1	12 Do k	1.8 01. 020 .41 8	12 Do k	1.8 91. 071 .43 9	12 Do k	1.8 91. 071 .43 9		
				Indikato r Hasil : Tingkat Laporan Pelaksa naan Tugas ASN yang disusun	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		1 0 0 2 0 0 . 6 1 2 3 .	Pelaksa naan Penatau sahaan dan Penguji an/Veri fikasi Keuang an SKPD	Sasaran : Gaji dan Tunjang an ASN, Tunjang an Kinerja ASN, Pelaksa naan Verifikas i, Pelaksa naan Akuntan si dan SPJ, Laporan Keuanga n Akhir tahun, LHP, Realisas i Fisik dan Keuanga n, Laporan Prognosi s realisasi anggara n Dinsosp 3akb														Kas ubb ag Keu anga n dan Aset	DIN SO SP3 AK B
--	--	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------

				Kab. Sanggau															
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Adminis- trasi Keuangan yang diverifikasi	1 Do k	1 Do k	212 .43 8.9 12	1 Do k	212 .43 8.9 12	1 Do k	223 .06 0.8 57	1 Do k	234 .21 3.9 00	1 Do k	245 .92 4.5 95	1 Do k	245 .92 4.5 95		
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Dokumen Adminis- trasi Keuangan yang diverifikasi	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				asi															
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 2 4 .	Koordin asi dan Pelaksa naan Akutan si SKPD	Sasaran : Gaji dan Tunjang an ASN, Tunjang an Kinerja ASN, Pelaksa naan Verifikas i, Pelaksa naan Akuntan si dan SPJ, Laporan Keuanga n Akhir tahun, LHP, Realisas i Fisik dan Keuanga n, Laporan Prognosi s realisasi														Kas ubb ag Keu anga n dan Aset	DIN SO SP3 AK B

				anggaran Dinsosp 3akb Kab. Sanggau															
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Do k	1 Do k	59. 484 .45 3	1 Do k	59. 484 .45 3	1 Do k	62. 458 .67 5	1 Do k	65. 581 .60 9	1 Do k	68. 860 .68 9	1 Do k	68. 860 .68 9		
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Dokumen Akuntansi dan Pelaporan	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				Keuanga n yang disusun															
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 2 5 .	Koordin asi dan Penyus unan Laporan Keuang an Akhir Tahun SKPD	Sasaran : Gaji dan Tunjang an ASN, Tunjang an Kinerja ASN, Pelaksa naan Verifikas i, Pelaksa naan Akuntan si dan SPJ, Laporan Keuanga n Akhir tahun, LHP, Realisas i Fisik dan Keuanga n, Laporan Prognosi s realisasi														Kas ubb ag Keu anga n dan Aset	DIN SO SP3 AK B

				anggaran Dinsosp 3akb Kab. Sanggau															
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Do k	1 Do k	5.4 13. 914	1 Do k	5.4 13. 914	1 Do k	5.6 84. 609	1 Do k	5.9 68. 840	1 Do k	6.2 67. 282	1 Do k	6.2 67. 282		
				Indikator Hasil : Tingkat Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		1 0 0 2 0 0 . 6 1 2 6 .	Pengelo laan dan Penyiap an Bahan Tangga pan Pemerik saan	Sasaran : Gaji dan Tunjang an ASN, Tunjang an Kinerja ASN, Pelaksa naan Verifikas i, Pelaksa naan Akuntan si dan SPJ, Laporan Keuanga n Akhir tahun, LHP, Realisas i Fisik dan Keuanga n, Laporan Prognosi s realisasi anggara n Dinsosp 3akb Kab.													Kas ubb ag Keu anga n dan Aset	DIN SO SP3 AK B
--	--	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------

				Sanggau															
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	1 Dok	3.8 22. 093	1 Dok	3.8 22. 093	1 Dok	4.0 13. 197	1 Dok	4.2 13. 857	1 Dok	4.4 24. 550	1 Dok	4.4 24. 550		
				Indikator Hasil : Tingkat Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				disusun															
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 2 7 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Sasaran : Gaji dan Tunjangan ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntansi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir tahun, LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi														Kasubbag Keuangan dan Aset	DIN SO SP3 AK B

				anggaran Dinsosp 3akb Kab. Sanggau															
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran yang disusun	1 Do k	1 Do k	7.3 58. 868	1 Do k	7.3 58. 868	1 Do k	7.7 26. 811	1 Do k	8.1 13. 151	1 Do k	8.5 18. 809	1 Do k	8.5 18. 809		
				Indikator Hasil : Tingkat Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran yang	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				disusun															
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 2 8 .	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sasaran : Gaji dan Tunjang an ASN, Tunjang an Kinerja ASN, Pelaksa naan Verifikas i, Pelaksa naan Akuntan si dan SPJ, Laporan Keuanga n Akhir tahun, LHP, Realisas i Fisik dan Keuanga n, Laporan Prognosi s														Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

				realisasi anggaran Dinsosp 3akb Kab. Sanggau															
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Do k	1 Do k	6.2 17. 596	1 Do k	6.2 17. 596	1 Do k	6.5 28. 475	1 Do k	6.8 54. 899	1 Do k	7.1 97. 644	1 Do k	7.1 97. 644		
				Indikator Hasil : Tingkat Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		1 0 0 2 0 . 6 1 3 .	Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah																
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 3 1 .	Penyus unan Perenca naan Kebutu han Barang Milik Daerah SKPD	Sasaran : Layanan administ rasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah Laporan Pengam anan Barang Milik Daerah yang disusun	3 Do k	3 Do k	4.9 81. 482	3 Do k	4.9 81. 482	3 Do k	5.2 30. 556	3 Do k	5.4 92. 083	3 Do k	5.7 66. 688	3 Do k	5.7 66. 688		

				Indikator Hasil : Tersedia nya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 3 2 .	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Do k	3 Do k	5.6 09. 400	3 Do k	5.6 09. 400	3 Do k	5.8 89. 870	3 Do k	6.1 84. 363	3 Do k	6.4 93. 581	3 Do k	6.4 93. 581		

				yang disusun															
				Indikator Hasil : Tersedia nya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 . 6 1 3 6 .	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengam	3 Do k	3 Do k	25.981 .80 0	3 Do k	25.981 .80 0	3 Do k	27.280 .89 0	3 Do k	28.644 .93 4	3 Do k	30.077 .18 1	3 Do k	30.077 .18 1		

				anan Barang Milik Daerah yang disusun															
				Indikato r Hasil : Tersedia nya Laporan Pengam anan Barang Milik Daerah yang disusun	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 6 1 5 .	Adminis trasi Kepega waian Perangk at Daerah																

		1 0 0 2 0 0 6 1 5 2 .	Pengad aan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengk apanny a	Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaika n pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaa n, Forjab, Usulan Perubah an Statuis CPNS ke PNS, usulan Satyalen cana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesu aian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan													Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
--	--	-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------

				Mengikut i Sosial asi dan Laporan Mengikut i Bimtek Dinsosp 3akb Kabupat en Sanggau															
				Indikator Keluara n : Jumlah pakaian dinas beserta perlengk apannya yang diadaka n	63 Ste 1	63 Ste 1	47. 223 .00 0	63 Ste 1	47. 223 .00 0	63 Ste 1	49. 584 .15 0	63 Ste 1	52. 063 .35 7	63 Ste 1	54. 666 .52 5	63 Ste 1	54. 666 .52 5		
				Indikator Hasil : Tersedia nya pakaian dinas beserta	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			

				perlengkapannya yang diadakan														
		1 0 0 2 0 0 6 1 5 3 .	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Statuis CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah,													Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3AKB

				Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengiku ti Sosialis asi dan Laporan Mengiku ti Bimtek Dinsosp 3akb Kabupat en Sanggau															
				Indikato r Keluara n : Jumlah laporan administ rasi kepegaw aian yang disusun	2 Do k	2 Do k	3.0 46. 230	2 Do k	3.0 46. 230	2 Do k	3.1 98. 541	2 Do k	3.3 58. 468	2 Do k	3.5 26. 392	2 Do k	3.5 26. 392		
				Indikato r Hasil : Tersedia nya laporan administ	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			

				rasi kepegaw aian yang disusun														
		1 0 0 2 0 0 6 1 5 4 .	Koordin asi dan Pelaksa naan Sistem Informa si Kepega waian	Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaika n pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaa n, Forjab, Usulan Perubah an Statuis CPNS ke PNS, usulan Satyalen cana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesu aian ijazah,													Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

				Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengiku ti Sosialis asi dan Laporan Mengiku ti Bimtek Dinsosp 3akb Kabupat en Sanggau															
				Indikato r Keluara n : Jumlah dokume n profil ASN Dinsosp 3akb yang disusun	2 Do k	2 Do k	6.1 14. 024	2 Do k	6.1 14. 024	2 Do k	6.4 19. 725	2 Do k	6.7 40. 711	2 Do k	7.0 77. 747	2 Do k	7.0 77. 747		
				Indikato r Hasil : Tersedia nya dokume n profil	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			

				ASN Dinsosp 3akb yang disusun														
		1 0 0 2 0 0 6 1 5 5 .	Monitor ing,Eval uasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaika n pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaa n, Forjab, Usulan Perubah an Statuis CPNS ke PNS, usulan Satyalen cana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesu aian ijazah,													Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

				Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengiku ti Sosialis asi dan Laporan Mengiku ti Bimtek Dinsosp 3akb Kabupat en Sanggau															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun	1 Do k	1 Do k	4.4 30. 250	1 Do k	4.6 51. 762	1 Do k	4.8 87. 350	1 Do k	5.1 28. 568	1 Do k	5.3 84. 996	1 Do k	5.6 54. 246		
				Indikato r Hasil : Tersedia nya Laporan Sasaran	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			

				Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun															
		1 0 0 2 0 6 1 6 .	Adminis trasi Umum Perangk at Daerah																
		1 0 0 2 0 0 6 1 6 1 .	Penyedi aan Kompo nen Instalasi Listrik/ Peneran gan Bangun an Kantor	Sasaran : Layanan administ rasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah Alat Listrik dan Elektron ik yang disediak an	5 Je nis	5 Je nis	6.1 18. 002	5 Je nis	6.4 23. 902	5 Je nis	6.7 45. 097	5 Je nis	7.0 82. 352	5 Je nis	7.4 36. 469	5 Je nis	7.8 08. 293		

				Indikator Hasil : Tersedia nya Alat Listrik dan Elektronik yang disediakan	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 6 2 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	12 Unit	115.837.765	12 Unit	121.629.653	12 Unit	127.711.135	12 Unit	134.096.692	12 Unit	140.801.527	12 Unit	147.841.603		

				Sebanya k 12 Unit															
				Indikato r Hasil : Tersedia nya peralata n dan perleng kapan kantor yang disediak an Sebanya k 12 Unit	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 6 4 .	Penyedi aan Bahan Logistik Kantor	Sasaran : Layanan administ rasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n :	8 Je nis	8 Je nis	29. 384 .79	8 Je nis	30. 854 .03	8 Je nis	32. 396 .73	8 Je nis	34. 016 .57	8 Je nis	35. 717 .40	8 Je nis	37. 503 .27		

				Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan sebanyak 8 Jenis			5		4		6		3		1		2		
				Indikator Hasil : Tersedianya bahan logistik kantor yang disediakan Sebanyak 8 Jenis	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 6 5 .	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umm dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

				Indikator Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggunaan yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	24.245.595	9 Jenis	25.457.874	9 Jenis	26.730.768	9 Jenis	28.067.306	9 Jenis	29.470.672	9 Jenis	30.944.205		
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah barang cetak dan penggunaan yang disediakan	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 6 6 .	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN	DIN SO SP3 AK B

			undang an															SOS P3A KB	
				Indikator Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	33 52 Ek sm plar	33 52 Ek sm plar	9.9 96. 800	33 52 Ek sm plar	10. 496 .64 0	33 52 Ek sm plar	11. 021 .47 2	33 52 Ek sm plar	11. 572 .54 5	33 52 Ek sm plar	12. 151 .17 2	33 52 Ek sm plar	12. 758 .73 1		
				Indikator Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			

		1 0 0 2 0 0 6 1 6 7 .	Penyediaan Bahan/Material	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah BBM yang disediakan	16.150 Liter	16.150 Liter	71.100.491	16.150 Liter	74.655.515	16.150 Liter	78.388.291	16.150 Liter	82.307.705	16.150 Liter	86.423.091	16.150 Liter	90.744.245		
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah BBM yang disediakan	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 6 9 .	Penyelenggaraan Rapat Koordin	Sasaran : Layanan administrasi														Kasubbag Umum	DIN SO SP3 AK B

			asi dan Konsult asi SKPD	umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	
				Indikato r Keluara n : Jumlah perjalan an dinas ke dalam dan ke luar daerah	19 2 OH	19 2 OH	94. 254 .00 0	19 2 OH	98. 966 .70 0	19 2 OH	103 .91 5.0 35	19 2 OH	109 .11 0.7 86	19 2 OH	114 .56 6.3 26	19 2 OH	120 .29 4.6 42		
				Indikato r Hasil : Tersedia nya perjalan an dinas ke dalam dan ke luar daerah	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 1 6 1 6 0 .	Penatau sahaan Arsip Dinami	Sasaran : Layanan administ rasi														Kas ubb ag Umu m	DIN SO SP3 AK B

			s pada SKPD	umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	
				Indikato r Keluara n : Jumlah Arsip Sekretar iat dan bidang yang disusun	5 Do k	5 Do k	5.3 45. 406	5 Do k	5.6 12. 676	5 Do k	5.8 93. 310	5 Do k	6.1 87. 975	5 Do k	6.4 97. 374	5 Do k	6.8 22. 243		
				Indikato r Hasil : Tersedia nya Arsip Sekretar iat dan bidang yang disusun	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 6 1 7 .	Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng																

			Urusan Pemerin tah Daerah																
		1 0 0 2 0 0 6 1 7 5 .	Pengad aan Mebel	Sasaran : Layanan administ rasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah mebel yang diadaka n	10 Je nis	10 Je nis	233 .15 2.1 13	10 Je nis	244 .80 9.7 18	10 Je nis	257 .05 0.2 04	10 Je nis	269 .90 2.7 14	10 Je nis	283 .39 7.8 50	10 Je nis	297 .56 7.7 43		
				Indikato r Hasil : Tersedia nya mebel yang diadaka n	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			

		1 0 0 2 0 6 1 8 .	Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah																
		1 0 0 2 0 0 6 1 8 1 .	Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	Sasaran : Layanan administ rasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah benda pos yang disediak an untuk surat menyur at	25 6 lem bar	25 6 le mb ar	2.5 52. 000	25 6 le mb ar	2.6 79. 600	25 6 le mb ar	2.8 13. 580	25 6 le mb ar	2.9 54. 259	25 6 le mb ar	3.1 01. 971	25 6 le mb ar	3.2 57. 070		

				Indikator Hasil : Tersedia nya benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 8 2 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubb ag Umu m dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah waktu penyediaan Jasa komuni	12 Bulan	12 Bulan	106 .99 4.0 53	12 Bulan	112 .34 3.7 55	12 Bulan	117 .96 0.9 43	12 Bulan	123 .85 8.9 90	12 Bulan	130 .05 1.9 40	12 Bulan	136 .55 4.5 37		

				kasi, sumber daya air dan listrik selama 12 Bulan															
				Indikator Hasil : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 Bulan	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 8 4 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

				Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26 Je nis	26 Je nis	123 .60 6.0 60	26 Je nis	129 .78 6.3 63	26 Je nis	136 .27 5.6 81	26 Je nis	143 .08 9.4 65	26 Je nis	150 .24 3.9 38	26 Je nis	157 .75 6.1 35		
				Indikator Hasil : Tersedianya pelayanan umum yang disediakan	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 6 1 9 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

		1 0 0 2 0 0 6 1 9 2 .	Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan , Pajak dan Perizina n Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an	Sasaran : Layanan administ rasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah kendara an dinas/o perasion al yang dibayar perizina nnya	12 Je nis	12 Je nis	109 .00 0.0 00	12 Je nis	114 .45 0.0 00	12 Je nis	120 .17 2.5 00	12 Je nis	126 .18 1.1 25	12 Je nis	132 .49 0.1 81	12 Je nis	139 .11 4.6 90		

				Indikator Hasil : Tersedianya endaraan dinas/operasional yang dibayar perizinannya	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 9 6 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	94 Unit	94 Unit	42.000.000	94 Unit	44.100.000	94 Unit	46.305.000	94 Unit	48.620.250	94 Unit	51.051.262	94 Unit	53.603.825		

				Indikator Hasil : Tersedia nya peralatan kerja yang diperbaiki	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 0 0 6 1 9 9 .	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp 3akb Kab. Sanggau														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	99.792.000	1 Unit	104.781.600	1 Unit	110.020.680	1 Unit	115.521.714	1 Unit	121.297.799	1 Unit	127.362.689		

				direhab															
				Indikator Hasil : Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhab	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		1 0 0 2 1 6 1 3 .	Penataan Organisasi																

		1 0 0 2 1 0 6 1 3 1 .	Pengelo laan Kelemb agaan dan Analisis Jabatan	Sasaran : Dokume n Evaluasi Kelemba gaan, Kebutuh an Pegawai 5 Tahun, Anjab ABK/rev iu, Evaluasi Jabatan /reviu, Standar Operasi onal Prosedu r (SOP)/re viu, Survey Kepuasa n Masyara kat, Standar Pelayan an/reviu , Rencana Kerja Reforma													Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------

				si Birokras i Perangk at Daerah (sesuai renstra) Dinsosp 3akb Kabupat en Sanggau															
				Indikato r Keluara n : Jumlah dokume n kelemba gaan dan analisa jabatan yang disusun	4 Do k	4 Do k	8.4 12. 696	4 Do k	8.8 33. 330	4 Do k	9.2 74. 997	4 Do k	9.7 38. 747	4 Do k	10. 225 .68 4	4 Do k	10. 736 .96 8		
				Indikato r Hasil : Tersedia nya dokume n kelemba gaan dan	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			

				analisa jabatan yang disusun															
		1 0 0 2 1 6 1 3 .	Penataan Organisasi																
		1 0 0 2 1 0 6 1 3 2 .	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sasaran : Dokumen Evaluasi Kelembagaan, Kebutuhan Pegawai 5 Tahun, Anjab ABK/reviu, Evaluasi Jabatan /reviu, Standar Operasional Prosedur (SOP)/reviu, Survey Kepuasan														Kasubbag Umum dan Kepegawaian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

				Masyarakat, Standar Pelayanan/reviu , Rencana Kerja Reforma si Birokrasi Perangkat Daerah (sesuai renstra) Dinsosp 3akb Kabupaten Sanggau															
				Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pelayanan publik yang disusun	4 Dok	4 Dok	4.0 87. 116	4 Dok	4.2 91. 471	4 Dok	4.5 06. 045	4 Dok	4.7 31. 347	4 Dok	4.9 67. 915	4 Dok	5.2 16. 310		
				Indikator Hasil : Tersedia	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			

				nya dokume n pelayan an publik yang disusun															
		1 0 0 2 1 6 1 3 .	Penataa n Organis asi																
		1 0 0 2 1 0 6 1 3 3 .	Peningk atan Kinerja dan Reform asi Birokra si	Sasaran : Dokume n Evaluasi Kelemba gaan, Kebutuh an Pegawai 5 Tahun, Anjab ABK/rev iu, Evaluasi Jabatan /reviu, Standar Operasi onal Prosedu r (SOP)/re													Kas ubb ag Umu m dan Kepe gawa ian DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B	

				viu, Survey Kepuasa n Masyara kat, Standar Pelayan an/reviu , Rencana Kerja Reforma si Birokras i Perangk at Daerah (sesuai renstra) Dinsosp 3akb Kabupat en Sanggau															
				Indikato r Keluara n : Jumlah dokume n peningk atan kinerja dan	4 Do k	4 Do k	3.3 43. 428	4 Do k	3.5 10. 599	4 Do k	3.6 86. 129	4 Do k	3.8 70. 435	4 Do k	4.0 63. 957	4 Do k	4.2 67. 155		

				reforma si birokras i yang disusun															
				Indikator Hasil : Tersedia nya dokumen peningkatan kinerja dan reforma si birokras i yang disusun	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %			
Terwujudnya Penurunan Masalah Kesejahteraan Sosial				Persentase Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS) yang difasilitasi														Kadis DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3AK B

ial Mas yar aka t (PM KS)																			
	Me nin gka ny a Per sen tas e PM KS yan g tert ang ani			Persent ase PMKS yang tertang ani														Kadi s DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
		1 0 0 6 2	PROGR AM PEMBE RDAYA AN SOSIAL	Indikat or Progra m : Persent ase PMKS yang Tertang ani	96, 30	96 ,9 0	255 .10 1.7 07	97 ,0 0	261 .76 9.5 54	97 ,4 5	274 .85 8.0 32	97 ,7 5	288 .60 0.9 32	98 ,2 0	303 .03 0.9 79	98 ,2 0	318 .18 2.5 28	Kabi d Pemb erd ayaa n Sosi al dan Faki r Misk in	DIN SO SP3 AK B

																		DIN SOS P3A KB	
		1 0 0 2 0 6 2 3	Pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan :Jumlah TKSK yang di Bina 16 TKSK															
		1 0 0 2 0 0 6 2 3 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota															
				Indikator Keluara	16 TK SK	16 TK SK	133 .35	16 TK SK	140 .02	16 TK SK	147 .02	16 TK SK	154 .37	16 TK SK	162 .09	16 TK SK	170 .20	Kasi Pemb berd	DIN SO SP3

				n : Jumlah TKSK yang di Bina 16 TKSK			6.9 47		4.7 94		6.0 34		7.3 35		6.2 02		1.0 12	ayaa n Pote nsi Sum ber Day a Sosi al Mas yara kat	AK B
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya Jumlah TKSK yang dibina															
		1 0 0 2 0 0 6 2 3 4	Peningk atan Kemam puan Potensi Sumber Kesejah teraan Sosial Kelemb agaan Masyar akat Kewena ngan Kabupa	Sasaran : Pengem bangan Potensi Sumber Kesejaht eraan Sosial Daerah Kabupat en/Kota	4 Le mb aga	4 Le mb aga	121 .74 4.7 60	4 Le mb aga	121 .74 4.7 60	4 Le mb aga	127 .83 1.9 98	4 Le mb aga	134 .22 3.5 97	4 Le mb aga	140 .93 4.7 77	4 Le mb aga	147 .98 1.5 16	Kasi Pem berd ayaa n Pote nsi Sum ber Day a Sosi al Mas yara kat	DIN SO SP3 AK B

			ten/Kota																
				Indikator Keluaran : Jumlah Potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang di Bina 4 Lembaga															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang di Bina 4 Lembaga															

		1 0 0 2 0 0 6 2 3 5	Peningk tan Kemam puan Sumber Daya Manusi a dan Penguat an Lembag a Konsult asi Kesejah teraan Keluarg a (LK3)	Sasaran : Pengem bangan Potensi Sumber Kesejaht eraan Sosial Daerah Kabupat en/Kota															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Laporan bantuan Sosial Tidak Terncan a dan Fasilitas i LKKS, LLI dan bantuan Sosial Lainnya	1 Do k	1 Do k	160 .03 7.4 54	1 Do k	160 .03 7.4 54	1 Do k	168 .03 9.3 26	1 Do k	176 .44 1.2 93	1 Do k	185 .26 3.3 57	1 Do k	194 .52 6.5 25	Kasi Pem berd ayaa n Pote nsi Sum ber Day a Sosi al Mas yara kat	DIN SO SP3 AK B

				Indikator Hasil : Tingkat capaian Dokumen Laporan bantuan Sosial Tidak Tercana dan Fasilitas i LKKS, LLI dan bantuan Sosial Lainnya															
		1 0 0 . 6 3 .	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Indikator Program : Persentase PMKS yang difasilitasi	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		Kabid RPJS	DIN SO SP3 AK B

		1 0 0 2 0 . 6 3 1 .	Kegiatan Pemula ngan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekeras an dari Titik Debark asi di Daerah Kabupa ten/Kot a untuk pemula ngan ke Desa / Kelurah an Asal	Indikato r Kegiatan : Jumlah dokume n data pemulan ganwarg a negara migran yang disusun														
		1 0 0 2 0 0 . 6 3 1 1 .	Fasilita si Pemula ngan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekeras an dari Titik Debark asi di	Sasaran : Warga Migran	20 00 Or an g	20 00 Or an g		20 00 Or an g	52. 00 Or an g	52. 00 Or an g	52. 00 Or an g	55. 132 .33 4	20 00 Or an g	57. 888 .95 0	20 00 Or an g	60. 783 .39 8	Kasi Pena ngan an Warg a Migr an Korb an Tind ak Keke rasa	DIN SO SP3 AK B

			Daerah Kabupa ten/Kot a untuk dipulan gkan ke Desa/K eluraha n Asal															n&O rang Terla ntar	
				Indikato r Keluara n : Jumlah Warga Negara Migran yang difasilita si															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya jumlah pekerja eks migran /orang terlantar /Traffic king yang tertanga ni															

		1 0 0 . 6 4 .	Progra m Rehabil itasi Sosial	Indikat or Progra m : Cakupa n pelayan an dan rehabili tasi kesejah teraan sosial	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		Kabi d RPJ S	DIN SO SP3 AK B
		1 0 0 2 0 . 6 4 1 .	Kegiata n Rehabili tasi Sosial Dasra Penyan dang Disabili tas Terlant ar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar serta Geland angan Pengem is dilu	Indikato r Kegiatan : Jumlah dokume n ODGJ yang tertanga ni dan jumlah penerim a bansos	2 Do k	2 Do k		2 Do k		2 Do k		2 Do k		2 Do k		2 Do k			

			panti sosial																
		1 0 0 2 0 0 . 6 4 1 1 .	Penyediaan Perumahan	Sasaran : Lanjut Usia Terlantar	42 5 Or an g	42 5 Or an g	524 .27 7.0 69	42 5 Or an g	524 .27 7.0 69	42 5 Or an g	550 .49 0.9 22	42 5 Or an g	578 .01 5.4 68	42 5 Or an g	606 .91 6.2 42	42 5 Or an g	367 .26 2.0 54		
				Indikator Keluaran : Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan permakanaan 425 orang															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Lansia yang memperoleh bantuan permakanaan 425 orang															

		1 0 0 2 0 0 . 6 4 1 6 .	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyrakata.	Sasaran : Penyandang Disabilitas	1 Do k	1 Do k	960 .61 8.3 82	1 Do k	960 .61 8.3 82	1 Do k	1.0 08. 649 .30 1	1 Do k	1.0 59. 081 .76 6	1 Do k	1.1 12. 035 .85 4	1 Do k	1.1 67. 637 .64 6		
				Indikator Keluaran : Jumlah Penyandang Disabilitas,															

				Lansia terlantar dan ODGJ yang tertanga ni															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya Penyand ang Disabilit as, Lansia terlantar dan ODGJ yang tertanga ni															
		1 0 0 2 0 1 . 6 4 1 2 .	Pemberi an Layana n Rujuka n.	Sasaran : Orang Dengan Gangu an Jiwa (ODGJ)	1 Do k	1 Do k	352 .71 3.4 32	1 Do k	370 .34 9.1 03	1 Do k	388 .86 6.5 58	1 Do k	408 .30 9.8 86	1 Do k	428 .72 5.3 81	1 Do k	450 .16 1.6 50		
				Indikato r Keluara n : Jumlah Penyand ang Disabilit															

				as, Lansia terlantar dan ODGJ yang tertanga ni															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya Penyand ang Disabilit as, Lansia terlantar dan ODGJ yang tertanga ni															
		1 0 0 . 6 5 .	PROGR AM PERLIN DUNGA N DAN JAMIN AN SOSIAL	Indikat or Progra m : Cakupa n pelayan an dan rehabili tasi kesejah teraan sosial	10 0%	10 0%	1.2 61. 555 .12 2	10 0%	1.2 61. 555 .12 2	10 0%	1.3 24. 632 .87 8	10 0%	1.3 90. 864 .52 2	10 0%	1.4 60. 407 .74 7	10 0%	1.5 33. 428 .13 4	Sekr etari s DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

		1 0 0 2 0 6 5 1	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar															
		1 0 0 2 0 0 . 6 5 1 3 .	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Sasaran : Panti Asuhan dan Anak Terlantar														
				Indikator Keluaran : Jumlah panti asuhan yang di bina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	9 Panti	9 Panti	311 .67 3.6 00	9 Panti	311 .67 3.6 00	9 Panti	327 .25 7.2 80	9 Panti	343 .62 0.1 44	9 Panti	360 .80 1.1 51	9 Panti	378 .84 1.2 08	DIN SO SP3 AK B

				Indikator Hasil : Terpenuhinya panti asuhan yang di bina dalam menyedi- akan pelayan- an kesejaht- eraan sosial	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		1 0 0 2 0 6 5 2	Pengelo- laan Data Fakir Miskin Cakupa- n Daerah Kabupa- ten/Ko- ta																
		1 0 0 2 0 0 . 6 5 2 1 .	Pendata- an Fakir Miskin Cakupa- n Daerah Kabupa- ten/Kot	Sasaran : Pendud- uk Miskin Kab.San- ggau															DIN SO SP3 AK B

			a																
				Indikator Keluaran : Jumlah Data Fakir Miskin Kab. Sanggau yg di Susun Sebanyak 1 Dokumen	1 Do k	1 Do k	949 .88 1.5 22	1 Do k	949 .88 1.5 22	1 Do k	997 .37 5.5 98	1 Do k	1.0 47. 244 .37 8	1 Do k	1.0 99. 606 .59 6	1 Do k	1.1 54. 586 .92 6		
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Data Fakir Miskin Kab. Sanggau yg di Susun Sebanyak 1 Dokumen	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		1 0 0 2 0 0 . 6 5 2 2 .	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau															DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin yang di Susun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	123 .33 2.1 48	1 Dok	123 .33 2.1 48	1 Dok	129 .49 8.7 55	1 Dok	135 .97 3.6 93	1 Dok	142 .77 2.3 77	1 Dok	149 .91 0.9 96		
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				yang di Susun Sebanya k 1 Dokume n															
		1 0 0 2 0 0 . 6 5 2 3 .	Fasilita si Bantua n Sosial Kesejah teraan Keluarg a	Sasaran : Pendud uk Miskin Kab.San ggau															DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Bantuan Kesejaht eraan Kelu ar yang Terfasilit asi Sebanya k 5 Dokume n	5 Do k	5 Do k	528 .19 5.9 82	5 Do k	528 .19 5.9 82	5 Do k	554 .60 5.7 81	5 Do k	582 .33 6.0 70	5 Do k	611 .45 2.8 73	5 Do k	642 .02 5.5 17		

				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Dokumen Bantuan Kesejahteraan Keluar yang Terfasilitasi Sebanyak 5 Dokumen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1 0 0 2 0 0 . 6 5 2 4 .	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sasaran : Penduduk Miskin dan KUBE Kab.Sanggau															DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bantuan	4 Kelompok	4 Kelompok	110 .64 6.7 66	4 Kelompok	110 .64 6.7 66	4 Kelompok	116 .17 9.1 04	4 Kelompok	121 .98 8.0 59	4 Kelompok	128 .08 7.4 62	4 Kelompok	134 .49 1.8 35		

				Kesejahteraan Keluar yang Terfasilitasi Sebanyak 5 Dokumen															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Dokumen Bantuan Kesejahteraan Keluar yang Terfasilitasi Sebanyak 5 Dokumen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1 0 0 . 6 6 .	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																

		1 0 0 2 0 . 6 6 1 .	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota															Kabid Rehsos	
		1 0 0 2 0 0 . 6 6 1 1 .	Penyediaan Makanan	Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial														Kasi PPK B	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Terpuhinya Jumlah penerima bantuan bencana alam atau sosial yang menerima sandang	75 Orang	75 Orang	69.273.562	75 Orang	69.273.562	75 Orang	72.737.240	75 Orang	76.374.102	75 Orang	80.192.807	75 Orang	84.202.447		

				yang disediakan sebanyak 75 orang															
				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Jumlah penerima bantuan bencana alam atau sosial yang menerima sandang yang disediakan sebanyak 75 orang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1 0 0 2 0 0 . 6 6 1 2 .	Penyediaan Sandang	Sasaran : Penerima Bantuan Bencana														Kasi PPK B	DIN SO SP3 AK B

				Alam / Sosial															
				Indikator Keluaran : Jumlah penerima bantuan bencana alam atau sosial yang menerima makanan yang disediakan sebanyak 75 Orang	75 Orang	75 Orang	69. 273 .56 2	75 Orang	69. 273 .56 2	75 Orang	72. 737 .24 0	75 Orang	76. 374 .10 2	75 Orang	80. 192 .80 7	75 Orang	84. 202 .44 7		
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah penerima bantuan bencana alam atau sosial yang	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				menerima makanan yang disediakan sebanyak 75 Orang															
		1 0 0 2 0 . 6 6 2 .	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Jumlah kelurahan/desa yang dibantu menjadi kampung siaga bencana	1 Kelurahan	1 Kelurahan	21.946.582	1 Kelurahan	21.946.582	1 Kelurahan	230.430.911	1 Kelurahan	24.196.106	1 Kelurahan	25.405.911	1 Kelurahan	26.676.207		
		1 0 0 2 0 0 . 6 6 2 1 .	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sasaran : Kampung Siaga Bencana														Kasi PPK B	DIN SO SP3 AK B

			a																
				Indikator : Kelurahan : Jumlah kelurahan/desa yang dibentuk menjadi kampung siaga bencana	1 Kelurahan	1 Kelurahan	21.946.582	1 Kelurahan	21.946.582	1 Kelurahan	230.430.911	1 Kelurahan	24.196.106	1 Kelurahan	25.405.911	1 Kelurahan	26.676.207		
				Indikator Hasil : Terpenuhinya jumlah kelurahan/desa yang dibentuk menjadi kampung siaga bencana															
		1 0 0 2 0 0 . 6 6 2 1 .	Koordinasi, sosialisasi dan	Sasaran : Tagana															

			pelaksa naan Taruna Siaga Bencan a																
				Indikato t Keluara n : Jumlah Tagana yang mendap at pembina an	46 Or an g					46 Or an g	39. 756 .58 2	46 Or an g	41. 744 .41 1	46 Or an g	43. 831 .63 1	46 Or an g	46. 023 .21 3	Kasi PPK B	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya jumlah Tagana yang mendap at Pembina an.															
		1 0 0 . 6 7 .	Progra m Pengelo laan Taman Makam	Indikato r Progra m : Jumlah Taman	3 TM P	3 TM P	263 .72 4.2 28	3 TM P	263 .72 4.2 28	3 TM P	276 .91 0.4 39	3 TM P	290 .75 5.9 61	3 TM P	305 .29 3.7 58	3 TM P	320 .55 8.4 46		

			Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	makam Pahlawan yang dipelihara 3 TMP															
		1 0 0 2 0 . 6 7 . 1 .	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
		1 0 0 2 0 0 . 6 7 . 1 1 .	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sasaran : Taman Makam Pahlawan	3 TMP	3 TMP	199 .94 4.6 27	3 TMP	199 .94 4.6 27	3 TMP	209 .94 1.8 58	3 TMP	220 .43 8.9 51	3 TMP	231 .46 0.8 98	3 TMP	243 .03 3.9 43		
				Indikator Keluaran :															

				Jumlah Taman makam Pahlawa n yang dipeliha ra 3 TMP															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya Taman makam Pahlawa n yang dipeliha ra 3 TMP															
		1 0 0 2 0 0 . 6 7 . 1 2 .	Pemelih araan Taman Makam Pahlaw an Nasiona l Kabupa ten/Kot a	Sasaran : Taman Makam Pahlawa n															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Taman makam	3 TM P	3 TM P	63. 779 .60 1	3 TM P	63. 779 .60 1	3 TM P	66. 968 .58 1	3 TM P	70. 317 .01 0	3 TM P	73. 832 .86 0	3 TM P	77. 524 .50 3		

				Pahlawa n yang dipeliha ra 3 TMP															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya Taman makam Pahlawa n yang dipeliha ra 3 TMP															
Ter wuj udn ya Pen ang ana n Kua lita s Hid up Per em pua n dan Ana k				Persent ase Peningk atan Kualitas Hidup dan Anak														Kadi s DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

	Me nin gka tny a Ind eks Pe mb erd aya an Gen der dan Ana k			Indeks Pember dayaan Gender (IDG)	61, 35	61 ,3 5		61 ,4 2		61 ,5 4		61 ,6 5		61 ,7 8		61 ,7 8		Kadi s DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
				Indeks Pemban gunan Gender (IPG)	80, 55	80 ,5 5		80 ,6 2		80 ,7 4		80 ,8 5		80 ,9 8		80 ,9 8			
		2 0 0 8 2	Progra m Keseras ian Kebijak an Pening katan Kualita s Anak dan Peremp uan	Indikat or Progra m: Persent ase Jumlah Desa yang memilik i komitm en terhada p KLA	15, 98	32 ,5 4	172 .62 4.5 04	49 ,1 1	172 .62 4.5 04	66 ,2 7	181 .25 5.7 28	83 ,4 3	190 .31 8.5 14	10 0	199 .83 4.4 40	10 0	209 .82 6.1 63	Kabi d Perli ndu nga n Ana k dan Kese jaht eraa n Kelu arga	DIN SO SP3 AK B

				Rasio KDRT	0,2 35	0, 02 4		0, 18 8		0, 46 45		0, 64 1		0, 11 7		0, 11 7		Kabi d Pem berd ayaa n Pere mpu an	DIN SO SP3 AK B
				Rasio Traffick ing	0,0 04	0, 00 4		0, 00 36		0, 00 32		0, 00 32		0, 00 27		0, 00 27		Kabi d Pem berd ayaa n Pere mpu an	DIN SO SP3 AK B
		2 0 0 2 0 8 2 1	Pelemb agaan Pengaru utama an Gender (PUG) pada Lembag a Pemerin tah Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Indikato r Kegiatan : Dokume n Pelaksa naan PUG dan PPRG yang disusun			86. 748 .11 4		86. 748 .11 4		91. 085 .51 9		95. 639 .79 5		100 .42 1.7 85		105 .44 2.8 75		

		2 0 0 2 0 0 8 2 1 3	Advoka si Kebijak an dan Pendam pingan Pelaksa naan PUG termas uk PPRG	Sasaran : Dokume n APE	1 Do k	1 Do k	86. 748 .11 4	1 Do k	86. 748 .11 4	1 Do k	91. 085 .51 9	1 Do k	95. 639 .79 5	1 Do k	100 .42 1.7 85	1 Do k	105 .44 2.8 75	Kasi PUG & Pera n serta Mas yara kat	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Indikato r APE yang disusun sebanya k 1 Dokume n															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya Jumlah Dokume n Indikato r APE yang															

				disusun sebanya k 1 Dokume n															
		2 0 0 2 0 8 2 2	Pember dayaan Peremp uan Bidang Politik, Hukum , Sosial dan Ekono mi pada Organis asi Kemas yarakat an Kewena ngan Kabupa ten/Ko ta	Indikat or Kegiata n : Tersedi anya Dokume n Partisip asi Peremp uan Dibidan g Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Do k	1 Do k	163 .68 8.2 56	1 Do k	163 .68 8.2 56	1 Do k	171 .87 2.6 68	1 Do k	180 .46 6.3 01	1 Do k	189 .48 9.6 16	1 Do k	198 .96 4.0 98	Kasi Peni ngk atan Kual itas Hidu p Pere mpu an	DIN SO SP3 AK B
		2 0 0 2 0 0 8 2 2 1	Advoka si Kebijak an dan Pendama pingan Peningk atan Partisip asi	Sasaran : Kaum Peremp uan Desa Fokus															

			Peremp uan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekono mi																
				Indikato r Keluara n : Dokume n Pelaksa naan Kegiatan Yang Disusun sebanya k 1 Dokume n	1 Do k	1 Do k	48. 459 .58 8	1 Do k	48. 459 .58 8	1 Do k	50. 882 .56 7	1 Do k	53. 426 .69 5	1 Do k	56. 098 .03 0	1 Do k	58. 902 .93 2	Kasi Peni ngka tan Kual itas Hidu p Pere mpu an	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Hasil: Dokume n Pelaksa naan Kegiatan Yang Disusun sebanya k 1 Dokume n															

		2 0 0 2 0 0 8 2 2 2	Sosialis asi Peningk atan Partisip asi Peremp uan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekono mi	Sasaran : Kaum Peremp uan Desa Fokus															
				Indikato r Keluara n : Dokume n Pelaksa naan Kegiatan Yang Disusun sebanya k 1 Dokume n	1 Do k	1 Do k	115 .22 8.6 68	1 Do k	115 .22 8.6 68	1 Do k	120 .99 0.1 01	1 Do k	127 .03 9.6 06	1 Do k	133 .39 1.5 86	1 Do k	140 .06 1.1 66	Kasi Peni ngka tan Kual itas Hidu p Pere mpu an	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Hasil: Dokume n Pelaksa naan Kegiatan															

				Yang Disusun sebanya k 1 Dokume n															
		2 0 0 2 0 8 2 3	Pengua tan dan Penge mbanga n Lembag a Penyed ia Layana n Pember dayaan Peremp uan Kewena ngan Kabupa ten/Ko ta	Indikat or Kegiata n : Jumlah Kegiata n Peremp uan yang Difasilit asi	4 Do k	4 Do k		4 Do k		4 Do k		4 Do k		4 Do k		4 Do k			
		2 0 0 2 0 0 8 2 3 1	Advoka si Kebijak an dan Pendamp ingan kepada Lembag a Penyedi a	Sasaran : Organis asi Peremp uan	31 OP	31 OP	1.0 53. 832 .87 3	31 OP	1.0 53. 832 .87 3	31 OP	1.1 06. 524 .51 6	31 OP	1.1 61. 850 .74 2	31 OP	1.2 19. 943 .27 9	31 OP	1.2 80. 940 .44 3	Kasi PUG & Pera n serta Mas yara kat	DIN SO SP3 AK B

			Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
				Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Perempuan yang Dibina															
				Indikator Hasil : Jumlah Organisasi Perempuan yang Dibina															
		200200 8232	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Sasaran : Dokumen KSI	1 Dok	1 Dok	85. 876 .39 0	1 Dok	85. 876 .39 0	1 Dok	90. 170 .20 9	1 Dok	94. 678 .71 9	1 Dok	99. 412 .65 5	1 Dok	104. 38 3.2 88	Kasi PUG & Peran serta	DIN SO SP3 AK B

			Lembag a Penyedi a Layana n Pember dayaan Peremp uan Kewena ngan Kabupa ten/Kot a															Mas yara kat	
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Kecamat an Sayang Ibu (KSI) yang Disusn															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya Jumlah Dokume n Kecamat an															

				Sayang Ibu (KSI) yang Disusn															
		2 0 0 2 0 0 8 2 3 3	Pengembangan Komuni kasi, Informa si dan Edukasi (KIE) Pember dayaan Peremp uan Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Sasaran : Dokume n Pelaksa naan Hari Kartini dan Hari Ibu	1 Do k	1 Do k	86. 572 .28 6	1 Do k	86. 572 .28 6	1 Do k	90. 900 .90 0	1 Do k	95. 445 .94 5	1 Do k	100 .21 8.2 42	1 Do k	105 .22 9.1 54	Kasi PUG & Pera n serta Mas yara kat	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Pelaksa naan Kegiat an Hari Kartini dan Hari Ibu															

				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu															
		2 0 0 8 3	Program Perlindungan Perempuan	Indikator Kegiatan : Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan															
		2 0 0 2 0 8 3 1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	80. 002 .17 7	1 Dok	80. 002 .17 7	1 Dok	84. 002 .28 5	1 Dok	88. 202 .40 0	1 Dok	92. 612 .52 0	1 Dok	97. 243 .14 6		

			uan lingkup Daerah Kabupa ten/Ko ta	Kegiata n yang Disusun															
		2 0 0 2 0 0 8 3 1 2	Advoka si Kebijak an dan Pendama pingan Layana n Perlind ungan Peremp uan Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Sasaran : Peremp uan Korban Kasus Kekeras an	1 Do k	1 Do k	80. 002 .17 7	1 Do k	80. 002 .17 7	1 Do k	84. 002 .28 5	1 Do k	88. 202 .40 0	1 Do k	92. 612 .52 0	1 Do k	97. 243 .14 6	Kasi Perli ndu nga n Hak Pere mpu an	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Kegiatan yang Disusun sebanya k 1 Dokume n															

				Indikator Hasil : Jumlah Dokumen Kegiatan yang Disusun sebanyak 1 Dokumen															
		2 0 0 2 0 8 3 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan :Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang disusun	1 Dok	1 Dok	29. 270 .10 4	1 Dok	29. 270 .10 4	1 Dok	30. 733 .60 9	1 Dok	32. 270 .28 9	1 Dok	33. 883 .80 3	1 Dok	35. 577 .99 4	Kasi Perlindu ngan Hak Perempuan	DIN SO SP3 AK B

		2 0 0 2 0 0 8 3 2 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan	1 Do k	1 Do k	29. 270 .10 4	1 Do k	29. 270 .10 4	1 Do k	30. 733 .60 9	1 Do k	32. 270 .28 9	1 Do k	33. 883 .80 3	1 Do k	35. 577 .99 4		
				Indikator Keluaran :Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang disusun															

				Indikator Hasil : Terpenuhinya Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang disusun															
		2 0 0 2 0 8 3 3	Pengua tan dan Penge mbanga n Lembag a Penyed ia Layana n Perlind ungan Peremp uan Tingkat Daerah Kabupa ten/Ko ta	Indikat or Keluara n : Jumlah Dokume n Kesepa katan Bersam a Antar Jejaring Yang Disusun	1 Do k	1 Do k	31. 073 .21 1	1 Do k	31. 073 .21 1	1 Do k	32. 626 .87 1	1 Do k	34. 258 .21 5	1 Do k	35. 971 .12 5	1 Do k	37. 769 .68 2	Kasi Perli ndu nga n Hak Pere mpu an	DIN SO SP3 AK B

		2 0 0 2 0 0 8 3 3 4	Penguat an Jejaring antar Lembag a Penyedi a Layana n Perlind ungan Peremp uan Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Sasaran : Dokume n Laporan Kegiatan	1 Do k	1 Do k	31. 073 .21 1	1 Do k	31. 073 .21 1	1 Do k	32. 626 .87 1	1 Do k	34. 258 .21 5	1 Do k	35. 971 .12 5	1 Do k	37. 769 .68 2		
				Indikato r Keluara n : Jumlah Dokume n Kesepak atan Bersam a Antar Jejaring Yang Disusun															

				Indikator Hasil :Terpenuhinya Jumlah Dokumen Kesepakatan Bersama Antar Jejaring Yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen															
		2 0 0 8 5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Indikator Program : Keterseediaan data gender dan anak (%)														Kabid Perlingungan Anak dan KK	DIN SO SP3 AK B
		2 0 0 2 0 8 5 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyaji	Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen	2 Do k	2 Do k	52. 080 .72 8	2 Do k	52. 080 .72 8	2 Do k	54. 684 .76 4	2 Do k	57. 419 .00 2	2 Do k	60. 289 .95 2	2 Do k	63. 304 .45 0	Kasi Advokasi dan Perlingungan	DIN SO SP3 AK B

			an Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Analisis, Dan Penyejiaan Data Gender Dan Anak Yang Disusun														Anak	
		200200 8511	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Dokumen Data Gender dan Anak	2 Do k	2 Do k	52. 080 .72 8	2 Do k	52. 080 .72 8	2 Do k	54. 684 .76 4	2 Do k	57. 419 .00 2	2 Do k	60. 289 .95 2	2 Do k	63. 304 .45 0		
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan Data Gender dan Anak															

				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Dokumen Penyediaan Data Gender dan Anak															
		2 0 0 8 6	Program Penuhan Hak Anak	Indikator Program : Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA														Kabid Perlingan Anak dan KK	DIN SO SP3 AK B
		2 0 0 2 0 8 6 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Pencapaian	1 Do k	1 Do k	48. 056 .21 8	1 Do k	48. 056 .21 8	1 Do k	54. 684 .76 4	1 Do k	57. 419 .00 2	1 Do k	55. 631 .07 9	1 Do k	63. 304 .45 0	Kasi Advokasi dan Perlingan Ana	DIN SO SP3 AK B

			Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Yang Disusun														k	
		2 0 0 2 0 0 8 6 1 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran ; Dokumen KLA	1 Do k	1 Do k	48. 056 .21 8	1 Do k	48. 056 .21 8	1 Do k	50. 459 .02 8	1 Do k	52. 981 .98 0	1 Do k	55. 631 .07 9	1 Do k	63. 304 .45 0		
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten															

				en Layak Anak Yang Disusun															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya Jumlah Dokume n Pencapa ian Indikato r Kabupat en Layak Anak Yang Disusun															
		2 0 0 2 0 8 6 2	Penguat an dan Pengem bangan Lembag a Penyedi a Layana n Peningk atan Kualita s Hidup Anak	Indikato r Kegiatan : Jumlah Dokume n Pencapa ian Indikato r Kabupat en Layak Anak	1 Do k	1 Do k	33. 407 .23 1	1 Do k	33. 407 .23 1	1 Do k	35. 077 .59 2	1 Do k	36. 831 .47 2	1 Do k	38. 673 .04 5	1 Do k	33. 407 .23 1	Kasi Advo kasi dan Perli ndu ngan Ana k	DIN SO SP3 AK B

			Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Yang Disusun															
		2 0 0 2 0 0 8 6 2 1	Penyedi aan Layana n Peningk atan Kualita s Hidup Anak Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Sasaran ; Dokume n KLA	1 Do k	1 Do k	33. 407 .23 1	1 Do k	33. 407 .23 1	1 Do k	35. 077 .59 2	1 Do k	36. 831 .47 2	1 Do k	38. 673 .04 5	1 Do k	33. 407 .23 1		
				Indikato r Keluara n : Jumlah Lembag a Penyedi a Layanan Yang Terlibat Dalam Peningk atan Kualitas idup															

				Anak Yang DiFasilitasi															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Yang Terlibat Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang DiFasilitasi															
		2 0 0 2 0 0 8 6 2 3	Pengembangan Komunitas, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Sasaran : Anak - anak Kab. Sanggau	1 Do k	1 Do k	105 .08 1.1 10	1 Do k	105 .08 1.1 10	1 Do k	110 .33 5.1 65	1 Do k	115 .85 1.9 23	1 Do k	121 .64 4.5 19	1 Do k	127 .72 6.7 45	Kasi Advokasi dan Perlindungan Anak	DIN SO SP3 AK B

			bagi Lembag a Penyedi a Layana n Peningk atan Kualita s Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupa ten/Kot a																
				Indikato r Keluara n : Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupat en, Kecamat an,Desa /Kelura han Yang Dibina	1 Do k	1 Do k	105 .08 1.1 10	1 Do k	105 .08 1.1 10	1 Do k	110 .33 5.1 65	1 Do k	115 .85 1.9 23	1 Do k	121 .64 4.5 19	1 Do k	127 .72 6.7 45		

				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Desa /Kelurahan Yang Dibina														
		2 0 0 8 7	Program Perlindungan Khusus Anak	Indikator Program : Persentase penyelesaian tindakan kekerasan terhadap anak													Kabid Perlindungan Anak dan KK	DIN SO SP3 AK B

		2 0 0 2 0 8 7 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Jumlah desa yang memiliki komitmen pencegahan kekerasan terhadap anak yang di bina	1 Do k	1 Do k	62. 821 .98 0	1 Do k	62. 821 .98 0	1 Do k	65. 963 .07 9	1 Do k	69. 261 .23 2	1 Do k	72. 724 .29 4	1 Do k	76. 036 .50 9	Kasi Advokasi dan Perindungan Anak	DIN SO SP3 AK B
		2 0 0 2 0 0 8 7 1 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Desa Layak Anak	1 Do k	1 Do k	62. 821 .98 0	1 Do k	62. 821 .98 0	1 Do k	65. 963 .07 9	1 Do k	69. 261 .23 2	1 Do k	72. 724 .29 4	1 Do k	76. 036 .50 9	Kasi Advokasi dan Perindungan Anak	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran :															

				Jumlah data kasus atau dokumen tindakan kekerasan terhadap anak															
				Indikator Hasil : Terpenuhi hanya jumlah data kasus atau dokumen tindakan kekerasan terhadap anak															
		2 0 0 2 0 8 7 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Indikator Kegiatan : jumlah penyelesaian tindakan kekerasan terhadap anak yang disusun	1 Do k	1 Do k		1 Do k		1 Do k		1 Do k		1 Do k		1 Do k		Kasi Pemenuhan Hak Anak	DIN SO SP3 AK B

			ukan Koordin asi Tingkat Daerah Kabupa ten/Kot a																
		2 0 0 2 0 0 8 7 2 1	Penyedi aan Layana n Pengad uan Masyar akat bagi Anak yang Memerl ukan Perlind ungan Khusus Tingkat Daerah Kabupa ten/Kot a	Sasaran : Desa Layak Anak	1 Do k	1 Do k	53. 476 .27 8	1 Do k	53. 476 .27 8	1 Do k	56. 150 .09 1	1 Do k	58. 957 .59 6	1 Do k	61. 905 .47 6	1 Do k	65. 000 .75 0	Kasi Pem enu han Hak Ana k	DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Jumah dokume n PATBM															

				yang disusun															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya dokumen PATBM yang disusun															
		2 0 0 2 0 0 8 7 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Desa Layak Anak	1 Do k	1 Do k	40. 882 .53 8	1 Do k	40. 882 .53 8	1 Do k	42. 926 .66 4	1 Do k	45. 072 .99 8	1 Do k	47. 326 .64 8	1 Do k	49. 692 .98 0	Kasi Pemenuhan Hak Anak	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah															

				dokumen data korban kekerasan pada anak yang disusun															
				Indikator Hasil : Terpenuhi jumlah dokumen data korban kekerasan pada anak yang disusun															
		2 0 0 2 0 0 8 7 2 3	Pengembangan Komunitas, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Sasaran : Desa Layak Anak	1 Do k	1 Do k	47. 312 .32 2	1 Do k	47. 312 .32 2	1 Do k	49. 677 .93 8	1 Do k	52. 161 .83 5	1 Do k	54. 769 .92 6	1 Do k	57. 508 .42 3	Kasi Pemenuhan Hak Anak	DIN SO SP3 AK B

			Kabupa ten/Kot a																
				Indikato r Keluara n : jumlah dokume n anak yang memerl ukan perlindu ngan khusus yang disusun															
				Indikato r Hasil : Terpenu hinya jumlah dokume n anak yang memerl ukan perlindu ngan khusus yang disusun															

		200200 8724	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Desa Layak Anak	1 Dok	1 Dok	5.1 19. 902	1 Dok	5.1 19. 902	1 Dok	5.3 75. 897	1 Dok	5.6 44. 691	1 Dok	5.9 26. 926	1 Dok	6.2 23. 272	Kasi Pemenuhan Hak Anak	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : jumlah dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang di susun															

				Indikator Hasil : Terpenuhi jumlah dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang di susun															
Terwujudnya Penganan Pengendalian Penduduk dan KB				Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38	1,36		1,34		1,32		1,3		1,28		1,28		Kadis DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3AKB

	Me nin gka tny a pen dud uk yan g ber KB	2 1 0 4 2	Progra m Pengen dalian Pendud uk	Total Fertilit y Rate														Kadi s DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B
		2 1 0 2 0 4 2 1	Pemadu an dan Sinkron isasi Kebijak an Pemerin tah Daerah Provinsi dengan Pemerin tah Daerah Kabupa ten/Kot a dalam rangka Pengen dalian Kuantit as Pendud uk		2, 24	2, 23		2, 22		2, 21		2, 2		2, 19		2, 19			

		2 1 0 2 0 0 4 2 1 1	Penyera sian Kebijak an Pemban gunan Daerah Kabupa ten/Kot a terhada p Kepend udukan , Keluarg a Berenca na dan Pemban gunan Keluarg a (Progra m KKBPK)	Sasaran : OPD Lintas Sektor Terkait	1 Do k	1 Do k	16. 149 .67 2	1 Do k	16. 149 .67 2	1 Do k	16. 957 .15 5	1 Do k	17. 805 .01 3	1 Do k	18. 952 .26 4	1 Do k	19. 630 .02 7		DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Keluara n : Tingkat Pencapa ianDoku men Perumu san Kebijaka	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				n Pengend alian Pendud uk dan Koalisi Kepend udukan yang Disusun															
				Indikato r Hasil : Tingkat Pencapa ian Dokume n Perumu san Kebijaka n Pengend alian Pendud uk dan Koalisi Kepend udukan yang Disusun															
		2 1 0 2 0 0 4 2 1 2	Penyus unan dan Pemanf ataan Grand	Sasaran : OPD Lintas Sektor Terkait															

			Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen GDPK yang disusun	15 Ke ca ma tan	15 Ke ca ma tan	52. 124 .88 6	15 Ke ca ma tan	52. 124 .88 6	15 Ke ca ma tan	54. 731 .13 0	15 Ke ca ma tan	57. 467 .68 6	15 Ke ca ma tan	60. 341 .07 1	15 Ke ca ma tan	63. 358 .12 4		DIN SO SP3 AK B
				Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen GDPK yang disusun	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		2 1 0 2 0 0 4 2 1 5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kepend	Sasaran : Sekolah															

			udukan Jalur Pendi kan Formal																
				Indikato r Keluara n : Jumlah Sekolah yang menjadi Sekolah Siaga Kepend udukan (SSK)	22 Se kol ah	22 Se kol ah	14. 357 .77 2	22 Se kol ah	14. 357 .77 2	22 Se kol ah	15. 075 .66 0	22 Se kol ah	15. 829 .44 3	22 Se kol ah	16. 620 .91 5	22 Se kol ah	17. 451 .96 1		DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Hasil : Tingkat Pencapa ian Sekolah yang menjadi Sekolah Siaga Kepend udukan (SSK)	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%					
		2 1 0 2 0 4 2 1	Pemeta an Perkira an Pengen																

			dalian Pendud uk Cakupa n Daerah Kabupa ten/Ko ta																
		2 1 0 2 0 0 4 2 1 8	Membe ntuk Rumah Data Kepend udukan di Kampu ng KB Untuk Memper kuat Integras i Progra m KKBPK di Sektor Lain	Sasaran : 15 Balai Penyulu h KB dan 33 Faskes															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Pengelol a Rumah	1 Do k	1 Do k	10. 155 .81 6	1 Do k	10. 155 .81 6	1 Do k	10. 663 .60 6	1 Do k	11. 196 .78 7	1 Do k	11. 756 .62 6	1 Do k	12. 344 .45 7		DIN SO SP3 AK B

				Data yang Dibina															
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Pengelola Rumah Data yang Dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2 1 0 2 0 1 4 2 1 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sasaran : 15 Balai Penyuluhan KB dan 33 Faskes															
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Lapangan dan	2 Do k	2 Do k	77. 408 .45 2	2 Do k	77. 408 .45 2	2 Do k	81. 278 .87 4	2 Do k	85. 342 .81 8	2 Do k	89. 609 .95 9	2 Do k	94. 090 .45 7		DIN SO SP3 AK B

				Pelayan an KB yang Disusun Sebanya k 2 Dokume n															
				Indikato r Hasil : Tingkat Pencapa ian Jumlah Laporan Pengend alian Lapanga n dan Pelayan an KB yang Disusun Sebanya k 2 Dokume n	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		2 1 0 2 0 1 4 2 1 4	Pembin aan dan Pengaw asan Pencata tan dan Pelapor an Progra	Sasaran : 15 Balai Penyulu h KB dan 33 Faskes															

			m KKBPK																
				Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang dibina	2 Do k	2 Do k	13. 503 .99 6	2 Do k	13. 503 .99 6	2 Do k	14. 179 .19 5	2 Do k	14. 888 .15 5	2 Do k	15. 632 .56 3	2 Do k	16. 414 .19 1		DIN SO SP3 AK B
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang dibina	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%					
		2 1 0 4 3	Progra m Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	63, 73	63 ,7 3	63 ,7 3	63 ,7 3	63 ,7 3	63 ,7 3	63 ,7 3	63 ,7 3	63 ,7 3	63 ,7 3				Kadis DIN SOS P3A KB	DIN SO SP3 AK B

		2 1 0 2 0 4 3 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penganjuran Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif	6 De sa	6 De sa		6 De sa		6 De sa		6 De sa		6 De sa		6 De sa			
		2 1 0 2 0 0 4 3 1 1	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja	6 De sa	6 De sa	17.516.884	6 De sa	17.516.884	6 De sa	18.392.728	6 De sa	19.312.364	6 De sa	20.277.982	6 De sa	21.291.881		DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah Stakehol	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				der dan Mitra Kerja yang di Advokas i Program															
				Indikato r Hasil : Tingkat Pencapa ian Jumlah Stakehol der dan Mitra Kerja yang di Advokas i Program															
		2 1 0 2 0 0 4 3 1 2	Komuni kasi, Informa si dan Edukasi (KIE) Progra m KKBPK sesuai Kearifa n Budaya Lokal	Sasaran : Pasanga n Usia Subur, Lintas Sektoral , Mitra kerja															

				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Cakupan KIE Program KKBPK peserta yang mendapatkan KIE Program KKBPK	6 Desa	6 Desa	13. 638 .02 4	6 Desa	13. 638 .02 4	6 Desa	14. 319 .92 5	6 Desa	15. 035 .92 1	6 Desa	15. 787 .71 7	6 Desa	16. 577 .10 3		DIN SO SP3 AK B
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Stakeholder dan Mitra Kerja yang di Advokasi Program	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		2 1 0 2 0 0 4 3 1 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana	Sasaran : Pasangan Usia Subur,															

			KIE Progra m KKBPK (DAU+ DAK)	Lintas Sektoral , Mitra kerja															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Sarana KIE	6 De sa	6 De sa	11. 828 .73 6	6 De sa	138 .92 9.9 68	6 De sa	145 .87 6.4 66	6 De sa	153 .17 0.2 89	6 De sa	160 .82 8.8 04	6 De sa	160 .82 8.8 04		DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Hasil : Tingkat Pencapa ian Sarana KIE	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		2 1 0 2 0 0 4 2 1 4	Promosi dan KIE Progra m KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektro nik serta Media Luar Ruang	Sasaran : Pasanga n Usia Subur, Lintas Sektoral , Mitra kerja															

				Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang mendapatkan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar	6 Desa	6 Desa	12. 767 .83 2	6 Desa	12. 767 .83 2	6 Desa	13. 406 .22 3	6 Desa	14. 076 .53 4	6 Desa	14. 780 .36 1	6 Desa	15. 519 .37 9		DIN SO SP3 AK B
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Peserta yang mendapatkan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa dan	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%					

				Elektronik serta Media Luar														
		2 1 0 2 0 0 4 3 1 5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja														
				Indikator Keluaran : Jumlah Promosi KIE melalui Media Massa,	6 Desa	6 Desa	14. 748 .02 8	6 Desa	14. 748 .02 8	6 Desa	15. 485 .42 9	6 Desa	16. 259 .70 0	6 Desa	17. 072 .68 5	6 Desa	17. 926 .32 0	DIN SO SP3 AK B

				Elektron ik dan Media Massa Lainnya sesuai kearifan Lokal Program KKBPK															
				Indikato r Hasil : Tingkat Pencapa ian Jumlah Promosi KIE melalui Media Massa, Elektron ik dan Media Massa Lainnya sesuai kearifan Lokal Program KKBPK	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		2 1 0 2 0 0 4 3 1 6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja															
				Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	6 Desa	6 Desa	23.811.840	6 Desa	23.811.840	6 Desa	25.002.432	6 Desa	26.252.553	6 Desa	27.565.181	6 Desa	28.943.440		DIN SO SP3 AK B

				Tingkat Kecamatan dan Desa															
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2 1 0 2 0 0 4 3 1 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK)	Sasaran : Sarana Balai penyuluhan															
				Indikator Keluaran : Jumlah sarana penyuluhan KKBPK				15 Kec	958.399.000	15 Kec	958.399.000	15 Kec	958.399.000	15 Kec	958.399.000	15 Kec	958.399.000		DIN SO SP3 AKB

				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan sarana pada Balai Penyuluhan KKBPK				100%		100%		100%		100%		100%			
		2 1 0 2 0 4 3 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																
		2 1 0 2 0 0 4 3 2 2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Sasaran : PKB dan PLKB di 15 Kecamatan dan Akseptor KB															
				Indikator Keluaran :	3 Paket	3 Paket	-	3 Paket	-	3 Paket	-	3 Paket	-	3 Paket	-	3 Paket	-		DIN SO SP3

				Tingkat Pencapaian Sarana Operasional Program KKBPK															AK B
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2 1 0 2 0 0 4 3 2 3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas	Sasaran : PKB dan PLKB di 15 Kecamatan dan Akseptor KB															

			Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P LKB)																
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Program KKBPK yang disusun	2 Do k	2 Do k	-	2 Do k	-	2 Do k	-	2 Do k	-	2 Do k	-	2 Do k	-		DIN SO SP3 AK B
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Desa	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		2 1 0 2 0 0 4 3 2 3	Pengger akan Kader Institus i Masyar akat Pedesaa n (IMP) (DAK)	Sasaran : Kader PPKBD dan SUB PPKBD															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Laporan PPKBD dan Sub PPKBD				12 Do k	811 .20 0.0 00	12 Do k	811 .20 0.0 00	12 Do k	811 .20 0.0 00	12 Do k	811 .20 0.0 00	12 Do k	811 .20 0.0 00		DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Hasil : Cakupa n Laporan PPKBD dan Sub PPKBD	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		2 1 0 2 0 4 3 3	Pengen dalian dan Pendist ribusia n Kebutu han Alat dan Obat Kontra sepsi serta Pelaksa naan Pelayan an KB di Daerah Kabupa ten/Ko ta																
		2 1 0 2 0 0 4 3 3 1	Pengen dalian Pendist ribusia n Alat dan Obat Kontras epsi dan Sarana Penunja ng Pelayan	Sasaran : 94,138 PUS Menjadi Peserta KB Baru dan Aktif di 15 kecamat an Kabupat en Sanggau															

			an KB ke Fasilita s Kesehat an Termas uk Jaringa n dan Jejaring nya (DAU+D AK)																
				Indikato r Keluara n : Cakupa n ketersed iaan dan distribu si alat dan obat kontrase psi untuk memenu hi permint aan masyara kat di Faskes, Jejaring	33 Fas kes	33 Fa sk es	11. 040 .96 1	33 Fa sk es	110 .04 0.9 61	33 Fa sk es	115 .54 3.0 09	33 Fa sk es	121 .32 0.1 59	33 Fa sk es	127 .38 6.1 67	33 Fa sk es	133 .75 5.4 75		DIN SO SP3 AK B

				dan Jaringan nya															
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Faskes, Jejaring dan Jaringan nya	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		2 1 0 2 0 0 4 3 3 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAU+DAK)	Sasaran : 94,138 PUS Menjadi Peserta KB Baru dan Aktif di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau															
				Indikator Keluaran : Persentase / Jumlah Pengguna MKJP	12.709 Akseptor	12.709 Akseptor	11.040961	12.709 Akseptor	1.382.4316	12.709 Akseptor	1.451.5268	12.709 Akseptor	1.524.1307	12.709 Akseptor	1.600.3363	12.709 Akseptor	1.680.3536		DIN SO SP3 AKB
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Penggunaan MKJP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2 1 0 2 0 0 4 3 3 6	Penyediaan Sarana Penunjang	Sasaran : 94,138 PUS Menjadi Peserta															

			Pelayan an KB (DAU+D AK)	KB Baru dan Aktif di 15 kecamat an Kabupat en Sanggau															
				Indikato r Keluara n : Persenta se / Jumlah Penggun a MKJP	15 PL KB	15 PL KB	16. 928 .70 3	15 PL KB	1.1 37. 120 .63 3	15 PL KB	1.1 93. 976 .66 4	15 PL KB	1.2 53. 675 .49 7	15 PL KB	1.3 16. 359 .27 2	15 PL KB	1.3 82. 177 .23 6		DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Hasil : Tingkat Pencapa ian Penggun aan MKJP	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			
		2 1 0 2 0 4 3 4	Pember dayaan dan Pening katan Peran serta Organis asi Kemas																

			yarakat an Tingkat Daerah Kabupa ten/Ko ta dalam Pelaksa naan Pelayan an dan Pembin aan Keserta an Ber- KB															
		2 1 0 2 0 0 4 3 4 1	Penguat an Peran serta Organis asi Kemasy arakata n dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksa naan Pelayan an dan Pembin aan Keserta	Sasaran : Lintas Sektoral , Mitra Kerja dan Masyara kat dn PUS (Pasang an Usia Subur)														

			an Ber- KB																
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penguatan Peran Organisasi Masyarakat serta Mitra Kerja	6 Desa	6 Desa	56. 500 .37 2	6 Desa	56. 500 .37 2	6 Desa	59. 325 .39 0	6 Desa	62. 291 .66 0	6 Desa	65. 406 .24 3	6 Desa	68. 676 .55 5		DIN SO SP3 AK B
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Laporan Penguatan Peran Organisasi Masyarakat serta Mitra	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%					

				Kerja															
		2 1 0 2 0 0 4 3 4 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Sasaran : Lintas Sektoral , Mitra Kerja dan Masyarakat dn PUS (Pasangan Usia Subur)															
				Indikator Keluaran : Jumlah Integrasi Pembangunan di Kampung KB	6 Desa	6 Desa	10. 051 .07 4	6 Desa	10. 051 .07 4	6 Desa	10. 553 .62 7	6 Desa	11. 081 .30 9	6 Desa	11. 635 .37 4	6 Desa	12. 217 .14 3		DIN SO SP3 AK B
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Laporan Penguatan Peran	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				Organisasi Masyarakat serta Mitra Kerja															
		2 1 0 2 0 0 4 3 4 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAU+DAK)	Sasaran : Lintas Sektoral, Mitra Kerja dan Masyarakat dan PUS (Pasangan Usia Subur)															
				Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	6 Desa	6 Desa	9.682.794	6 Desa	180.382.794	6 Desa	198.872.030	6 Desa	208.815.631	6 Desa	219.256.413	6 Desa	230.219.234		DIN SO SP3 AKB
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

				ianJuml ah Pengelol aan Program KKBPK di kampun g KB															
		2 1 0 2 0 0 4 3 4 4	Pembin aan Terpad u Kampu ng KB	Sasaran : Lintas Sektoral , Mitra Kerja dan Masyara kat dn PUS (Pasang an Usia Subur)															
				Indikato r Keluara n : Jumlah Pembina an di Kampun g KB	6 De sa	6 De sa	9.9 44. 946	6 De sa	9.9 44. 946	6 De sa	10. 442 .19 3	6 De sa	10. 964 .30 2	6 De sa	11. 512 .51 8	6 De sa	12. 088 .14 4		DIN SO SP3 AK B
				Indikato r Hasil : Tingkat Jumlah Pembina an di	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				Kampung KB															
		2 1 0 4 4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indikator Program : Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)														Kabid Perlindungan Anak dan KK	DIN SO SP3 AK B
		2 1 0 2 0 4 4 1	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indikator Kegiatan : Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang Dibina															

		2 1 0 2 0 0 4 4 1 1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	Sasaran : Kelompok Tribina	6 De sa	6 De sa	87. 774 .69 8	6 De sa	42. 743 .67 0	6 De sa	44. 880 .85 3	6 De sa	47. 124 .89 6	6 De sa	49. 481 .14 0	6 De sa	51. 955 .19 8	Kasi Kethan dan Kesejahteraan Keluarga	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang Dibina	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang Dibina															
		2 1 0 2 0 0 4 4 1 2	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga /UPPKS	Sasaran : kelompok Kegiatan Tribina															

			)																
				Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kegiatan Tribina yang mendap atkan sarana	2 Po kta n Tri bin a			2 Po kta n Tri bin a	Rp3 1.9 55. 000	2 Po kta n Tri bin a	Rp3 1.9 55. 000	2 Po kta n Tri bin a	Rp3 1.9 55. 000	2 Po kta n Tri bin a	Rp3 1.9 55. 000	2 Po kta n Tri bin a	Rp3 1.9 55. 000		
				Indikator Hasil : Cakupa n Kelompo k Kegiatan Tribina yang mendap atkan sarana	10 0%	10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%		10 0%			

		2 1 0 2 0 0 4 4 1 6	Penyediaan Biaya Operasi onal bagi kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) DAK KB	Sasaran : kelompok Kegiatan Tribina															
				Indikator Keluara n : Jumlah Laporan Poktan Tribina	2 La por an	2 La por an		2 La por an	946 .31 0.0 00	2 La por an	946 .31 0.0 00	2 La por an	946 .31 0.0 00	2 La por an	946 .31 0.0 00	2 La por an	946 .31 0.0 00		

				Indikator Hasil : Cakupan Laporan Poktan Tribina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2 1 0 2 0 0 4 4 1 8	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Sasaran : Remaja dan Guru BK	5 Orang	5 Orang	87.774.698	5 Orang	87.774.698	5 Orang	92.163.432	5 Orang	96.771.604	5 Orang	101.610.184	5 Orang	106.690.694	Kasi Kethan dan Kesejahteraan Keluarga	DIN SO SP3 AK B
				Indikator Keluaran : Jumlah Remaja dan Guru Bimbingan Konseling yang Dibina															

				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Remaja dan Guru Bimbingan Konseling yang Dibina															
		2 1 0 2 0 4 4 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Indikator Kegiatan : Jumlah Kader yang di Bina															

			aan Ketaha nan dan Keseja hteraan Keluarg a																
		2 1 0 2 0 0 4 4 2 2	Penday agunaa n Mitra Kerja dan Organis asi Kemasy arakata n dalam Pengger akan Operasi onal Pembin aan Progra m Ketaha nan dan Kesejah teraan Keluarg a (BKB,	Sasaran : Kader Tribina	11 0 Or an g	11 0 Or an g	15. 499 .20 2	11 0 Or an g	15. 499 .20 2	11 0 Or an g	16. 274 .16 2	11 0 Or an g	17. 087 .87 0	11 0 Or an g	17. 942 .26 3	11 0 Or an g	18. 839 .37 6	Kasi Keta hana n dan Kese jahte raan Kelu arga	DIN SO SP3 AK B

			BKR, BKL,																
				Indikator Keluaran : Jumlah Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Dibina															
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Dibina															

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sanggau, Januari
2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana

Drs. ALOYSIUS
YANTO, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19640909
199412 1 003

Dari table 6.1 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 15 (Lima Belas) program serta 36 (Lima Puluh Enam) kegiatan dan 114 Sub Kegiatan yang membidangi tiga urusan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Dari semua program dan kegiatan tersebut telah mencakup tujuan dan sasaran yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang telah termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024.

Pembangunan pemberdayaan perempuan di kabupaten Sanggau diselenggarakan melalui berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak dan meningkatnya peran atau partisipasi perempuan dalam segala bidang, yaitu meliputi hukum, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya. Atas dasar ini, kebijakan terhadap masalah perempuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu mengembangkan potensi dirinya, mengakses sumber daya ekonomi, dan mewujudkan jati dirinya serta kiprah dalam kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 3 (tiga) program yaitu :
 - ✓ Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - ✓ Indikator Kinerja Program
 1. Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Komitmen terhadap KLA
 2. Rasio KDRT
 3. Rasio Trafficking
 - ✓ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - ✓ Indikator Kinerja Program
 1. Persentase Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- ✓ Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- ✓ Indikator Kinerja Program

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tujuan program ini adalah peningkatan SDM perempuan melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik.

Tolak ukur keberhasilan dari program ini adalah : terwujudnya peningkatan SDM perempuan dan persentase keterwakilan perempuan dibidang politik dan jabatan publik dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan

Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui peningkatan kapasitas lembaga dan penguatan peran lembaga pemberdayaan perempuan dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Peningkatan SDM pelayanan Pendamping korban KDRT
- b. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- c. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan melalui :

- ✓ Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan

Tujuan dari program ini adalah pembinaan terhadap perempuan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Pembinaan organisasi perempuan
- b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta Gender dalam kesetaraan Gender

- c. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- d. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
- e. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

✓ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuannya adalah Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Fasilitasi Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah dan pengembangan kreatifitas dan bakat anak Kab. Sanggau.
- b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
- c. Fasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak
- d. Sosialisasi yang terkait dengan perlindungan Anak

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Umum urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 (Empat) Program.

Untuk Mewujudkan peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas didalam sistem Jaminan Kesehatan melalui :

✓ Program Keluarga Berencana

✓ Indikator Program

- 1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif

Tujuan dari program ini adalah pepaduan kebijakan pelayanan KB yang merata, berkualitas, peningkatan pelayanan KB serta peningkatan Kapasitas PLKB dan Tenaga Medis dalam mendukung Penggerakan dan Penyuluhan KB.

✓ Program Kesehatan reproduksi Remaja

✓ Indikator Program

Tujuan program ini adalah : Mewujudkan keluarga berkualitas melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran sikap dan perilaku remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi remaja.

✓ Program Pelayanan Kontrasepsi

✓ Indikator Program

1. Persentase Peserta KB MKJP

Tujuan Program ini adalah : Meningkatkan peran serta Akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang yang berkualitas.

✓ Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

✓ Indikator Program

Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)

Tujuan Program ini adalah : Mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Sejahtera.

3. Urusan Sosial

Kebijakan umum urusan sosial adalah :

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Tolak ukur dari program ini adalah meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui :

✓ Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

✓ Indikator dari Program ini adalah Persentase PMKS yang tertangani.

Program ini bertujuan mewujudkan pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin. Tolak ukur dari program ini adalah terwujudnya melalui peningkatan

pemberdayaan sosial, peningkatan pengembangan sumber potensi sumber kesejahteraan dan peningkatan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LKS) serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan.

- ✓ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase PMKS yang ditangani
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, ketahanan sosial khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat / relawan sosial.

Tolak ukur keberhasilan program ini adalah meningkatnya prosentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Adapun kegiatan pokok dari kegiatan ini adalah rehabilitasi sosial yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum

- ✓ Program Pembinaan Penyandang Disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Trauma.
- ✓ Indikator Program ini adalah:
 1. Persentase Penyandang Disabilitas dan Trauma yang tertangani
 2. Persentase ODGJ yang ditangani

Kedua hal tersebut diatas lah yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program tersebut.

Tujuan dari program ini adalah penyediaan kebutuhan dasar bagi para penyandang Disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan fasilitas pengantaran ke Rumah sakit Jiwa serta penjemputan kembali Orang dengan gangguan jiwa bila dinyatakan sudah sembuh oleh Tim Medis.

- ✓ Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Tujuan dari program ini adalah terwujudnya pembinaan panti asuhan melalui kegiatan rehabilitasi dan operasional bagi panti asuhan.
- ✓ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang di bina.

Tujuan dari program ini adalah peningkatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga pemberdayaan sosial, sehingga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

- ✓ Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- ✓ Indikator dari program ini adalah Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, sehingga dapat memiliki kehidupan yang layak. Rumah tidak layak huni ini sendiri yang memiliki Prinsip Gotong royong, kerjasama serta asas kekeluargaan dalam prinsip Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase pelestarian Taman Makam Nasional/Monumen Nilai Kepahlawanan.

Tujuan Kegiatan pokok dari program ini adalah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional serta pengenalan nilai-nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 adalah selama lima tahun. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 3 (tiga urusan) yaitu Urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk mencapai kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana memiliki indikator yang sangat mendukung untuk pencapaian target kinerja selama tahun 2019-2024.

Guna mendukung Visi Kabupaten Sanggau yaitu Sanggau maju dan terdepan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjalankan salah satu Misi tersebut adalah Misi yang ke 2 yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing. Serta menjalankan misi ke 4 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan teknologi yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	95,33	95,33	95,33	95,33	95,33	95,33	95,33
2	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	16,79	15,95	15,15	14,39	14,39	14,39	14,39
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja	C	CC	CC	B	B	B	B
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80	85	90	95	95	95
6	Indeks Pelayanan Publik							
	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang tertangani	96,30	96,90	97, 00	97, 45	98,20	98,20	98,20
6.2	Persentase PMKS yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100

6.3	Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni	4, 31	23,05	41,79	60,54	79,91	100	100
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	60	60	60	60	60	60	60
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	n.a	61,35	61,42	61,54	61,65	61,78	61,78
2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n.a	80,55	80,62	80,74	80,85	80,98	80,98
2.3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	86,14	81,55	85,42	89,70	94,18	98,89	98,89
2.4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,04	30,06	30,09	30,10	30,15	30,18	30,18
2.5.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
2.6.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00
2.7.	Rasio KDRT	0,23	0,02	0,19	0,46	0,64	0,12	0,12
2.8.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21
2.9.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	60,67
2.10.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	38,67	38,67	38,67	38,67	38,67	38,67	38,67
2.11.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
2.12.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
2.13.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
2.14.	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA
2.15.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0
2.16.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100

2.17.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	100
2.18.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100	100	100
2.19.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
2.20.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100
2.21.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100
2.22.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28	1,28
8.2	Total Fertility Rate	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,19
8.3	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
8.4	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
8.5	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	1	0	0	0	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	1	1	1	1	9	9
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	1	1	1	3	3
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58	2,55	2,55

8.9	Ratio Akseptor	63,73	66,23	68,73	71,23	73,73	76,23	76,23
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	63,73	66,23	68,73	71,23	73,73	76,23	76,23
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	89,77	86,90	84,16	81,56	79,1	76,78	76,78
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	6,38	6,06	5,76	5,47	4,94	4,94	4,94
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,02	9,74	9,51	9,36	9,16	9,12	9,12
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,93	12,26	13,50	14,65	15,65	16,35	16,35
8.15	Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	76,24	76,74	77,24	77,74	78,24	78,74	78,74
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	2	5	8	11	15	15
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100	100	100	100	100	100	100
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	13,00	20,00	20,00	30,00	35,00	35,00	35,00
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	169	169	174	174	174	174	174
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

8.24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	66,67	66,69	66,74	66,74	66,76	66,81	66,81
8.25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	74,00
8.27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8.28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8.29	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

(Sumber : RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024)

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINSOSP3AKB		SASARAN DINSOSP3AKB		INDIKATOR KINERJA		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTR A	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A
								2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
						LAYANAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
						Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera								
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan													
		2.	Terkendalinya Laju Penduduk			2.	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,66	1,34	1,32	1,3	1,28	1,28
				2.1	Meningkatnya Keberhasilan ber-KB	2.1	.1	Total Fertility Rate	2.24	2.23	2.22	2.21	2.2	2.2
						Sosial								
2.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial PPKS													
		2..	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS			2.1	.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10,15	17,50	40,00	45,00	47,25	47,25
				2.1	Meningkatnya Kemandirian PPKS	2.1	.1	Persentase PPKS yang mandiri	7,50	15,00	15,00	20,00	22,50	22,50

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
3.	Meningkatnya Kualitas Gender												
		3.	Terwujudnya peningkatan Kualitas Gender			3.		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	80,55	80,62	80,74	80,85	80,98
				3.1	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	3.1	.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,35	61,42	61,54	61,65	61,78
						3.2		Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya
4.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					1.		Nilai SAKIP	47,41	50	57	66	71
		1.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			1.	1.	Nilai SAKIP	47,41	50	57	66	71
				1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.	1.1	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau		57,59%	60,00	60,50%	70,00%
				1.2.	Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	1.	2.1	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur		91,27%	92,00%	92,50%	93,00%

Untuk dapat menghitung Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024, serta sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Table 7.3

Rumusan Indikator

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Urusan Sosial		
6.1	Persentase PPKS	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Tetangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Kab.Sanggau}}$
6.2	Persentase PPKS yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mandiri} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Kab.Sanggau}}$
6.3	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	$\frac{\text{Jumlah Panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos} \times 100\%}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}$
6.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah RTLH yang direhabilitasi} \times 100\%}{\text{Jumlah RTLH selama satu tahun}}$
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun} \times 100 \%}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}}$
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
2.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{1}{3} \times (ede 1) + X(ede 2) + 1 inc-dis$
2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{1}{3} [(1por + 1Dm + 1 Inc - -dis)]$
2.3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan} \times 100\%}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}}$
2.4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga pemerintah} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan di lembaga pemerintah}}$

		Jumlah pekerja perempuan
2.5.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	$\frac{\text{Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan} \times 100\%}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}}$
2.6.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga swasta} \times 100\%}{\text{Jumlah pekerja perempuan}}$
2.7.	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT} \times 100\%}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$
2.8.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	$\frac{\text{APM-SD Perempuan} \times 100\%}{\text{APM-SD Laki-laki}}$
2.9.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	$\frac{\text{APM-SMP Perempuan} \times 100\%}{\text{APM-SD Laki-laki}}$
2.10.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	$\frac{\text{Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun} \times 100\%}{\text{Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18}}$
2.11.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 thn} \times 100\%}{\text{Jumlah anak laki-laki tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 thn}}$
2.12.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	$\frac{\text{AMH 15-24 Perempuan}}{\text{AMH 15-24 laki-laki}}$
2.13.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	$\frac{\text{Banyaknya pekerja upahan perempuandisektor non pertanian} \times 100\%}{\text{Banyaknya pekerja upahan disektor non pertanian}}$
2.14.	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Predikat Kabupaten Layak Anak
2.16.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu} \times 100\%}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk keunit pelayanan terpadu}}$
2.17.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	$\frac{\text{Jumlah korban Ktp/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas maupun tatalaksana Ktp/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}}$
2.18.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos} \times 100}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos\%}}$
2.19.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap}}$

		perempuan dan anak yang disidangkan
2.20.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat pelayanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100\%$
2.21.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT}} \times 100\%$
2.22.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}}{\text{jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	$Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$
8.2	Total Fertility Rate	TFR = Angka Kelahiran total ASFR = Angka kelahiran menurut kelompok umur
8.3	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dikampung KB}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
8.4	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyusun \& memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
8.5	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah perda atau perkada tentang pengendalian penduduk
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah Sektor
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$
8.9	Ratio Akseptor	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah kelompok perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 100\%$
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$

	(PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	$\frac{\text{diumur kurang 20 thn}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$
8.15	Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	$\frac{\text{Jumlah PUS yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100\%$
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100\%$
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \times 100\%$
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	$\frac{\text{Jumlah PIKR/M}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan}}{\text{Jumlah PKB/PLKB}} \times 100\%$
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa}}{\text{Jumlah Desa/kelurahan}} \times 100\%$
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah alkon premix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang alkon}}{\text{Perkiraan permintaan masyarakat}} \times 100\%$
8.24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	$\frac{\text{Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah faskes dan jejaring}} \times 100\%$
8.25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	$\frac{\text{Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga}} \times 100\%$
8.27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	$\frac{\text{Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga}}{\text{Jumlah kelompok kegiatan}} \times 100\%$
8.28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang}}{\text{Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak}} \times 100\%$
8.29	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana	$\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB}}{100\%}$

	dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Jumlah APBD dan APBDes
--	--	------------------------

(Sumber : Permendagri 86 tahun 2017)

Dari rumusan indikator di atas sesuai Permendagri 86 tahun 2017, maka didapatkan hasil indikator guna mencapai target Rencana Strategis Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024.

Untuk pencapaian target Rencana Strategis tersebut, maka dibagi menjadi tiga urusan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta pencapaian target indikator tersebut telah terakomodir pada program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana selama tahun 2019-2024, jika pada tahun berjalan ternyata program dan kegiatan tersebut tidak mampu mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengatur strategi sehingga dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau selama kurun waktu 2019-2024.

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019 – 2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 - 2024.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2019 – 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.